

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : NOVEMBER 2023

■ Nusantara

DPD RI Tekankan Sosialisasi Lima Proposal Kenegaraan

■ Varia Senat

Kembalikan Marwah Otonomi Daerah!

Kembali ke UUD 1945 dengan Santun:

Proposal DPD RI Mendapat Dukungan Luas

CAPRES DAN CAWAPRES 2024

TAK MEWAKILI KEINDONESIAAN

SCAN ME!

Akses MAJALAH SENATOR Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia

ISSN 2978-3118

ISSN 2987-3118



9

772987

311004



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

Dirgahayu

52Th
KORPRI

KORPRI Melayani, Berkontribusi
dan Berinovasi Untuk Negeri

**PENASEHAT**

Rahman Hadi
Lalu Niqman Zahir
Oni Choiruddin

**PEMIMPIN UMUM /
PENANGGUNG JAWAB**

Mahyu Darma

PEMIMPIN REDAKSI

Heru Firdan

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Fitra Helmi

REDAKTUR FOTO

Agus Wiharto

SEKRETARIS REDAKSI

Theresia Oktavina

STAF REDAKSI

Aryo Kristiyanto, Arso P Nugroho,
Betria Eriani, Didin Saputra,
Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari,
Muhamad Fathoni, Nanda Russia Rola

FOTOGRAFER

Andrianto, Arifin Nur Wijaya,
Dimas Yulian Santoso, Eko Sudjarwo,
Fikri Muftih Akbar, Haryo C.Wicaksono,
Lela Sadiyah, Mujiono, N.Nurdianto,
Prabandaru Ega Baskoro, Ryan Nur Fajry,
Surya Pongsitanan, Unang Gunawan,.

**NARASUMBER/
KONSULTAN MEDIA**

Syafruddin Al, Syafril Amir, Boby Lukman
dan Nuryanto (Desain Grafis)

DISTRIBUSI

Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1
Gedung B DPD RI, Jl.Jend.Gatot Subroto No.6
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjangsenator@gmail.com

Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id

// website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //

FB: www.facebook.com/DPDRI // twitter @dpdri

Pilpres Langsung atau *Electoral College*?

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, dengan tulus mengungkapkan keprihatinannya terkait dengan komposisi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum Presiden 2024. Ia merasa bahwa komposisi tersebut tidak mencerminkan keberagaman dan keindonesiaan, melainkan terlalu terpusat pada Pulau Jawa saja, atau sangat "Jawasentrisme". Sultan tidak bermaksud meremehkan hasil nominasi yang dilakukan oleh partai politik, namun ia menyoroti dampak yang mungkin terjadi akibat fokus yang terlalu besar pada peta elektoral, yang bisa merusak kualitas dan masa depan demokrasi di negeri ini.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, Sultan mengusul penerapan sistem *electoral college* oleh anggota parlemen: DPR dan DPD RI, pada pemilihan presiden. Usulan ini juga mencakup kemungkinan adanya lebih dari satu wakil presiden untuk mencerminkan keragaman dan wilayah geografis yang luas di Indonesia.

Namun, perlu diingat bahwa saat ini, sistem pemilihan presiden di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi yang tertuang dalam Konstitusi, yang mengadopsi sistem presidensial. Berbeda dengan sistem *electoral college* yang diterapkan di Amerika Serikat, di Indonesia, pemilih langsung memilih calon presiden tanpa melalui elektor. Sistem ini dirancang untuk menjalankan prinsip demokrasi yang menekankan bahwa setiap suara warga negara memiliki bobot yang sama.

Implementasi sistem *electoral college* di Indonesia akan mengharuskan perubahan konstitusi yang substansial dan mungkin akan meningkatkan birokrasi serta kompleksitas dalam pemilihan presiden. Selain itu, dapat saja ditemui resistensi dari masyarakat Indonesia terhadap perubahan ini.

Untuk mencapai representasi yang lebih adil dan inklusif dalam pemilihan presiden, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil tanpa mengubah sistem pemilihan yang ada. Ini mencakup penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan, pengawasan yang ketat, peningkatan pendidikan politik dan kesadaran politik, serta peran yang lebih kuat dari partai politik dalam mencalonkan calon dari berbagai daerah dan latar belakang etnis.

Reformasi dalam sistem pemilihan presiden juga bisa menjadi solusi, untuk memastikan calon dari berbagai daerah memiliki peluang yang setara untuk bersaing. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mencapai representasi yang lebih adil dan berkeadilan dalam pemilihan presiden tanpa harus mengadopsi sistem *electoral college* yang berbeda dari yang telah ada. (*)

Pemred



SENAT UTAMA

6



- Capres dan Cawapres 2024
Tak Mewakili Keindonesiaan
- Begini Cara *Electoral College* di AS untuk Memilih Presiden
- Profil Singkat 3 Pasangan Capres dan Cawapres Pilpres 2024
- Capres-Cawapres 2024 Harus Adu Gagasan
- Anggota DPD RI Soroti Keputusan MK yang Tidak Pas
- LaNyalla Prihatin, Indonesia Semakin Krisis Negarawan
- MK Bentuk MKMK Selidiki Dugaan Pelanggaran Kode Etik
- Jimly Asshiddiqie:
Belum Pernah *Image* MK Terpuruk Seperti Sekarang

SENAT KHUSUS

20



- Kembali ke UUD 1945 dengan Santun:
Proposal DPD RI Mendapat Dukungan Luas
- LaNyalla Minta Forum Doktor Kawal Proses Desakan ke MPR

- Ini Tanggapan FDCI Tentang Proposal Kenegaraan DPD RI
- PP Muhammadiyah Dukung DPD RI:
Teruskan Gagasan Koreksi Sistem Bernegara
- ICMI Janji akan Perkuat Proposal DPD RI
- WALUBI Desak Konsensus Nasional Kembali ke UUD 1945
- Kaji dan Tinjau Ulang Sistem Bernegara!

NUSANTARA

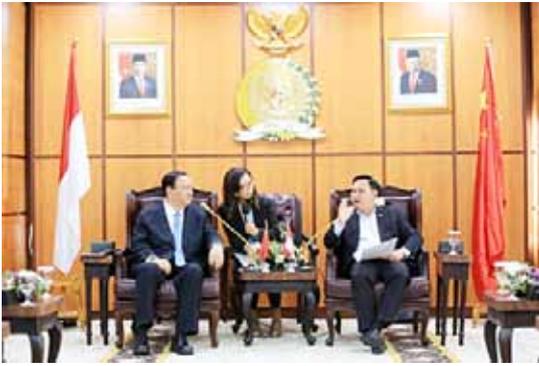
32

- DPD RI Tekankan Sosialisasi Lima Proposal Kenegaraan
- Beragam Laporan dari Daerah:
Dari Lapas Hingga Penurunan Status Bandara Supadio
- Tidak Bisa Dibiarkan, Pinjol Menyengsarakan
- Senator Filep Apresiasi Pj Gubernur PBD
- LaNyalla Dukung Upaya Kemnaker Lindungi Ojol
- Mengajak Generasi Muda Terlibat di Kancah Politik
- Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Terima KWP Award 2023
- Pengiriman Pelajar Indonesia ke Mesir Diberbincangkan
- Anggota DPD RI Prihatin Maraknya Perundungan di Sekolah
- Budaya Politik Dinasti dan Feodalisme Harus Diubah
- Masalah Hukum Adat Jangan Diabaikan
- Senator Cholid Mahmud (Tutup) Usia
- Indonesia Harus Jadi Kunci Industri Nikel Dunia
- Pimpinan DPD RI Prihatin, Anggota BPK Tersangka Korupsi
- DPD RI Serukan Serangan Israel Harus Dihentikan



GALERI

34



VARIA SENAT

50



- Kembali Marwah Otonomi Daerah!
- DPD RI Tetapkan Susunan Keanggotaan Alkel
- Soal Listrik, Komite II Adakan Raker di Sorong
- BULD DPD RI Terima Audiensi DPRD Tanah Datar

SEKRETARIAT JENDERAL

56



- Sekretariat Jenderal DPD RI Raih Kembali JDIHN Award Tahun 2023

KAJIAN DAERAH

58

KRISIS BERAS DI NEGERI AGRARIS

Oleh : Rindang Mustikawati/Analisis Legislatif Muda

GAGASAN

60



Catatan Kritis Atas Proposal Kenegaraan DPD RI:

Peluang dan Tantangan Anggota DPR dari Jalur Perseorangan

Oleh: Friederich Batari *)

WISATA

62

Empat Destinasi Menarik di Kalbar



KULINER

63

Empat Kuliner Enak dari Kalsel





CAPRES DAN CAWAPRES 2024 TAK MEWAKILI KEINDONESIAAN



Sultan B Najamudin
Foto: PHM (Subbag Media)



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memberi catatan khusus sekaligus mengungkap keprihatinannya terhadap komposisi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum Presiden 2024. Menurutnya, nominasi yang diusung oleh elit politik cenderung tidak mewakili keindonesiaan yang plural, dengan fokus yang kuat pada Pulau Jawa, dikenal sebagai Jawasentrisme.

“Kami menghormati hasil nominasi para capres dan cawapres oleh partai politik, namun, pertimbangan yang terlalu berfokus pada peta elektoral bisa merusak kualitas dan masa depan demokrasi kita,” ujar Sultan dalam keterangan resminya akhir Oktober 2023. Ia menambahkan bahwa pola nominasi ini menghasilkan kecurigaan dan perpecahan di antara elit politik. Sultan mengkritisi pilihan elit yang terpaku pada jumlah suara dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sehingga muncul istilah “*battle ground*” yang menjadi pusat pertempuran politik.

Sultan menekankan, membuat ‘*battle ground*’ hanya akan meningkatkan polarisasi

politik. Jawasentrisme saat pilpres mengubah tradisi politik Indonesia menjadi semakin feodal. Sebagai mantan Wakil Gubernur Bengkulu, ia percaya bahwa Pemilu 2024 akan memberikan banyak pelajaran bagi demokrasi Indonesia. Sultan menilai bahwa sistem demokrasi bangsa ini semakin mengarah ke liberalisme, sehingga perlu ada evaluasi.

“Kami mengusulkan agar diterapkan sistem *electoral college* oleh anggota parlemen, termasuk DPR dan DPD RI, pada pemilihan presiden,” kata Sultan sembari menambahkan bahwa dia pernah mengusulkan agar ada lebih dari satu wakil presiden untuk mencerminkan keberagaman dan luasnya wilayah Indonesia.

Selain itu, Sultan menyarankan pemikiran lain untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya, opsi ini akan lebih ideal dan akomodatif, serta menghindari biaya politik yang mahal. “Sistem ini juga lebih efektif untuk mengelola bangsa sebesar ini sesuai dengan konsep bernegara Pancasila,” pungkasnya. (*)

DAFTAR NAMA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NON JAWA

PRESIDEN

No	Nama	Jabatan	Masa Bakti	Asal
1	Assaat	Acting Presiden	27 Des 1949 – 15 Agust 1950	Sumatera Barat
2	Megawati Soekarnoputri	Presiden	23 Juli 2001 – 20 Oktober	Bengkulu- Minang-Jawa
3	BJ Habibie	Presiden	21 Mei 1998 – 20 Okto 1999	Pare-pare, Sulsel

WAKIL PRESIDEN

No	Nama	Jabatan	Masa Bakti	Asal
1	Mohammad Hatta	Wakil Presiden	18 Agust 1945 – 1 Des 1956	Sumatera Barat
2	Adam Malik	Wakil Presiden	23 Maret 1978 – 11 Maret 1983	Sumatera Utara
3	Try Sutrisno	Wakil Presiden	11 Maret 1993 – 11 Maret 1998	Sumatera Selatan
4	BJ Habibie	Wakil Presiden	11 Maret 1998 – 21 Mei 1998	Pare-Pare, Sulawesi Selatan
5	Megawati Soekarnoputri	Wakil Presiden	21 Oktober 1999 – 23 Juli 2001	Bengkulu, Minang, Jawa
6	Hamzah Haz	Wakil Presiden	26 Juli 2001 – 20 Oktober 2004	Kalimantan Barat
7	HM. Jusuf Kalla	Wakil Presiden	20 Okt 2004 – 20 Okt 2009 20 Okt 2014 – 20 Okt 2019	Sulawesi Selatan

Sumber: Syafruddin AL/dari berbagai sumber.



Begini Cara *Electoral College* di AS untuk Memilih Presiden

Sistem “*Electoral College*” adalah mekanisme yang digunakan di Amerika Serikat untuk memilih presiden dan wakil presiden. Meskipun warga negara memberikan suara dalam pemilihan presiden, mereka sebenarnya sedang memilih sekelompok “elektor” yang kemudian memilih presiden dan wakil presiden. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sistem ini:

1. Alokasi Elektor: Setiap negara bagian memiliki jumlah elektor yang sama dengan total anggota Senat dan DPR yang mewakili negara bagian tersebut di Kongres. Contohnya, jika sebuah negara bagian memiliki 2 senator dan 5 anggota DPR, maka negara bagian tersebut akan memiliki 7 elektor. D.C. (District of Columbia) memiliki 3 elektor meskipun tidak memiliki perwakilan di Kongres.

2. Pemberian Suara Elektor: Sebagian besar negara bagian di AS menganut sistem “*winner-takes-all*”, yang berarti kandidat yang memenangkan suara terbanyak di suatu negara bagian akan memperoleh semua suara elektor dari negara bagian tersebut. Namun, ada beberapa negara bagian, seperti Maine dan Nebraska, yang membagi suara elektor berdasarkan hasil suara di distrik-distrik tertentu.

3. Pemilihan: Setelah pemilihan umum diadakan dan suara rakyat dihitung, elektor dari setiap negara bagian akan berkumpul di ibu kota negara bagian masing-masing pada bulan Desember untuk memberikan suara mereka. Seorang calon presiden harus mem-

peroleh setidaknya 270 dari 538 suara elektor untuk menjadi presiden.

4. Kontroversi: Sistem *Electoral College* sering mendapat kritik karena bisa menghasilkan situasi di mana seorang kandidat memenangkan suara rakyat secara keseluruhan (suara populer) namun kalah dalam pemilihan *Electoral College*. Ini terjadi dalam beberapa pemilihan presiden, termasuk pada tahun 2000 dan 2016.

5. Alasan Historis: Sistem ini diciptakan oleh para pendiri AS sebagai kompromi antara pemilihan presiden oleh Kongres dan pemilihan oleh suara rakyat langsung. Tujuan-Nya adalah untuk menyeimbangkan kekuatan antara negara bagian besar dan kecil dan untuk memberikan proteksi tambahan terhadap kemungkinan pemilihan kandidat yang tidak layak oleh publik.

Seiring waktu, telah ada berbagai usulan untuk mengubah atau menghapus sistem *Electoral College*, namun hingga saat ini sistem ini masih tetap digunakan dalam pemilihan presiden AS. (*)

Sumber: Syafruddin AL/dari berbagai sumber.

Profil Singkat 3 Pasangan Capres dan Cawapres Pilpres 2024

ilustrasi: DetikJateng/Edy Wahyono



Pesta demokrasi sudah kian mendekat, dan Indonesia tengah bersiap untuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah melempar topi ke dalam arena politik, siap bersaing dalam pertarungan untuk memperebutkan kursi paling penting

di negeri ini.

Mereka adalah; pertama, pasangan Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar (Cak Imin): Pasangan yang mendaftar ke KPU pada 19 Oktober 2023 dengan membawa perpaduan yang menarik. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017 - 2022, dikenal

sebagai pemimpin kharismatik yang aktif dalam berbagai isu sosial dan politik. Sementara itu, Muhaimin Iskandar, akrab dipanggil Cak Imin, adalah figur yang telah berkiprah lama dalam politik Indonesia, terutama dalam Partai Kebangkitan Bangsa



(PKB). Mereka membawa kombinasi pengalaman eksekutif dan legislatif ke dalam pertarungan.

Kedua, Ganjar Pranowo & Mohammad Mahfud MD: Pasangan ini juga mendaftar pada 19 Oktober 2023, membawa perpaduan yang kuat antara kepemimpinan daerah dan pengalaman di tingkat nasional. Ganjar Pranowo yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, telah dikenal karena kinerja cemerlangnya dalam menjalankan pemerintahan provinsi. Di sisi lain, Mohammad Mahfud MD adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pasangan ini menawarkan gabungan pengalaman yang luas dalam dunia hukum dan pemerintahan daerah.

Ketiga, Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka. Pasangan yang baru saja mendaftar pada 25 Oktober 2023 ini membawa perpaduan yang menonjol antara pengalaman militer dan kepemimpinan lokal. Prabowo Subianto, seorang jenderal dan politisi yang telah berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden, saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka adalah Walikota Surakarta, dan merupakan putra dari Presiden Joko Widodo. Mereka membawa nuansa yang kuat dari berbagai spektrum politik.

Pemilihan Umum Presiden 2024 akan menjadi pertarungan yang menarik, di mana masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin yang dianggap paling cocok untuk membawa negara ini ke masa depan yang lebih baik. Tiga pasangan ini memperkaya bursa kandidat dengan pengalaman dan visi yang berbeda, dan pilpres ini akan menjadi salah satu momen terpenting dalam sejarah politik Indonesia. Berikut adalah profil ringkas masing-masing kandidat.



Anies Rasyid Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969. Ia menem-puh pendidikan sarjana bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1989-1995. Kemudian, melanjutkan pendidikan dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, Univer-sity of Maryland, College Park tahun 1997, dan meraih gelar masternya pada Desember 1998. Sesaat setelah lulus dari Maryland, ia kembali men-dapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 1999 dan lulus dengan meraih gelar Ph.D nya pada 2004. Semua di Amerika Serikat.

Anies pernah menjabat sebagai direktur riset The Indonesian Institute, sebuah lembaga penelitian kebi-jakan publik. Selain itu, ia juga pernah menjabat seba-gai Rektor Universitas Paramadina. Karier politiknya diawali dengan dilantiknya Anies sebagai Menteri Pen-didikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju yang diusung Jokowi. Lantas, ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2017-2022.

Anies Rasyid Baswedan



Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, lahir pada 24 September 1966 di Jombang, Jawa Timur. Ia adalah seorang tokoh politik yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam dunia politik Indonesia. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cak Imin pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dalam periode 2009-2014. Perjalanan karir politiknya yang cemerlang mencakup berbagai peran pen-ting di tingkat nasional, dan ia telah men-jadi sosok yang sangat dihormati dalam politik Indonesia. Pada Pemilihan Umum Presiden 2024, Cak Imin membawa pengalaman yang luas dalam pemerintahan dan politik, serta visinya untuk kontribusi lebih lanjut dalam pembangunan Indonesia.





G a n j a r Pranowo, seorang politisi kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah pada 10 Juni 1968, adalah seorang yang telah menorehkan jejak kepemimpinan yang mengesankan di tingkat provinsi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, memimpin provinsi itu dengan penuh dedikasi. Selain itu, pada periode 2004-2009, Ganjar Pranowo juga berkiprah sebagai Anggota Komisi IV DPR RI dengan tanggung jawabnya meliputi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Ganjar Pranowo membawa pengalaman yang luas sebagai pemimpin daerah dan legislatif ke dalam kandidat calon presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2024..

Ganjar Pranowo



Mahfud MD

Mahfud MD, lahir pada tanggal 13 Mei 1957 di Sampang, Madura, Jawa Timur, adalah seorang tokoh yang membawa pengalaman yang luar biasa dalam sektor hukum dan politik ke dalam kandidat calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2024. Mahfud MD adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju yang dikenal tegas dan berani. Ia memegang peran penting dalam mengelola aspek politik dan hukum negara. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli hukum yang memiliki pengalaman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, pernah menjadi Anggota DPR dan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Selain itu, Mahfud MD telah berkontribusi dalam dunia pendidikan sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984.





Prabowo Subianto

Prabowo Subianto, lahir pada 17 Oktober 1951 di Jakarta, adalah seorang politisi dan mantan perwira militer yang memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Soemitro Djohadikusumo dan Dora Marie Sigar. Sebelum terjun ke politik, Prabowo memiliki karir militernya yang mencolok. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Kopasus dan Pangkosrad di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan memiliki pengalaman militer yang luas. Kemudian, Prabowo Subianto melanjutkan karirnya di politik dengan mendirikan sekaligus menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Saat ini Prabowo adalah Menteri Pertahanan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju, di mana ia berpengalaman peran dalam mengelola aspek pertahanan negara. Pilpres 2024 merupakan Pilpres ketiga yang pernah diikuti Prabowo.

Gibran Rakabuming Raka

Gibran Rakabuming Raka, lahir pada 1 Oktober 1987 di Surakarta, adalah seorang politisi muda yang saat ini menjabat sebagai Walikota Solo untuk periode 2021-2026. Ia adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo, yang merupakan salah satu figur terkemuka dalam politik Indonesia. Selain pengalaman politiknya sebagai

Walikota, Gibran sebelumnya memiliki jejak yang cukup mengesankan dalam dunia bisnis kuliner. Beberapa usaha yang dimilikinya, seperti Mangkok Ku, Chili Pari, Ternakopi, dan lainnya, menunjukkan keterlibatannya dalam industri makanan dan minuman sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Kehadirannya dalam Pemilihan Umum Presiden 2024 mewakili peran generasi muda dalam politik Indonesia. (*)

Capres-Cawapres 2024 Harus Adu Gagasan

Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia telah memasuki tahap pendaftaran bakal calon presiden-wakil presiden dari tanggal 19-25 Oktober. Dalam proses ini, para kandidat diingatkan agar menjadikan pilpres sebagai ajang untuk membandingkan rekam jejak dan gagasan, bukan sebagai kesempatan untuk saling menyebarkan kebencian.

Fahira Idris, Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, menyoroti adanya banyak forum adu gagasan yang melibatkan kandidat-kandidat. Forum-forum tersebut, yang seringkali diselenggarakan oleh kampus dan berbagai organisasi, dianggapnya dapat menciptakan suasana pilpres yang lebih kondusif. Hal ini dikarenakan diskusi publik lebih banyak mengedepankan gagasan dan rekam jejak kandidat dibandingkan hal-hal yang bersifat negatif.

Fahira menambahkan, Pilpres 2024 akan lebih menarik dengan dominasi diskusi gagasan antar-kandidat di berbagai forum. Dia menekankan pentingnya sekali-kali untuk menginstruksikan pen-

dukungnya agar fokus pada gagasan dan rekam jejak, bukan pada hal-hal yang bersifat negatif, apalagi kebencian.

Kepada semua kandidat, Fahira berpesan agar mereka tegas melarang pendukungnya menyebarkan sentimen buruk, terutama yang berbasis SARA, terhadap kandidat lain. Menurutnya, Pilpres 2024 seharusnya menjadi ajang pendidikan politik yang mengedepankan rasionalitas dalam memilih kandidat berdasarkan gagasan dan rekam jejaknya.

Menurut Fahira, yang juga merupakan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, ada dua hal yang mempengaruhi suasana Pilpres 2024. Pertama adalah kualitas dari para kandidat itu sendiri, terutama dari narasi yang mereka sampaikan. Kedua adalah perilaku para pendukung kandidat, khususnya dalam hal perkataan dan perbuatan mereka.

Jika kedua aspek tersebut dapat dikelola dengan baik, maka Pilpres 2024 diharapkan berjalan dalam suasana yang sejuk dan kondusif. "Saya optimis semua kandidat memiliki kesadaran untuk menjadikan Pilpres 2024 sebagai kontestasi yang bermartabat dengan mengedepankan gagasan dan rekam jejak," tutup Fahira.

(*)

Fahira Idris

(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

ANGGOTA DPD RI SOROTI Keputusan MK yang Tidak Pas

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan Almas Tsaqibbirru Re A, seorang mahasiswa asal Surakarta, yang mengajukan uji materi terkait undang-undang yang menetapkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keputusan ini menimbulkan reaksi negatif dari berbagai pihak, terutama karena pada hari yang sama, MK telah menolak permohonan serupa dari pemohon lain.

Keputusan MK ini mendapatkan respons negatif. Salah satu yang mengungkapkan kekecewaannya adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad, yang akrab disapa Gus Hilmy. Ia merasa bahwa keputusan MK memiliki motif yang berbeda, yang tidak sesuai dengan semangat independensi lembaga tersebut. Gus Hilmy menyatakan bahwa keputus-

an tersebut tampaknya memiliki tujuan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dipegang oleh MK.

Anggota DPD RI asal Yogyakarta ini menilai, dampak yang mungkin ditimbulkan oleh putusan tersebut adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut di masa mendatang. Ia berpendapat bahwa negara seolah-olah sedang dimanipulasi untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dinilainya sebagai langkah mundur bagi bangsa ini, dengan potensi kerusakan terhadap independensi MK dan upaya membangun demokrasi yang sedang berlangsung, terutama menjelang pemilihan umum.

“Ini menjadi titik kemunduran bangsa kita. Kepercayaan masyarakat terhadap MK rusak, MK sendiri sudah tidak independen, dan di sisi lain, kita berupaya membangun demokrasi sedemikian rupa, tetapi justru dirusak ketika menjelang pesta demokrasi,” katanya sembari mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh atmosfer yang semakin memanas. (*)



Gus Hilmy

Foto: PHM (Subbag Media)



LaNyalla Prihatin, Indonesia Semakin Krisis Negarawan

Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengungkap adanya manuver yang tidak lazim di dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mendapat sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, hal itu menunjukkan Indonesia semakin krisis negarawan, karena semua lembaga sudah berpolitik praktis, termasuk hakim konstitusi.

LaNyalla mengungkapkan keprihatinannya terhadap perkembangan ini. Dia berpendapat bahwa sejak Indonesia beralih ke sistem liberal, dengan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, serta dominasi partai politik sebagai pemegang kedaulatan, negara ini semakin kehilangan jati diri, serta nilai-nilai adab, etika, dan moral.

“Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra itu menunjukkan bahwa MK sebagai *the guardian of constitution* sudah tercemar tradisi politik. Ini tentu sangat buruk bagi Indonesia,” tandas LaNyalla, pertengahan Oktober 2023.

Anggota DPD RI dari Jawa Timur itu menyoroti bahwa negara yang menganut liberalisme dan terseret

“Indonesia harus kembali pada falsafah dasar negaranya, yaitu Pancasila. Sistem yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa adalah sistem demokrasi Pancasila murni, dan penting untuk mengembalikan negara ini ke akar-akarnya.”

LaNyalla Mahmud Mattalitti

ke neoliberal serta ekonomi yang kapitalistik, seringkali menunjukkan kemenangan materialisme atas idealisme. Ini, menurutnya, telah menciptakan perilaku politik di Indonesia yang semakin kehilangan rasa malu, yang juga dibiarkan oleh elit politik. Rakyat menjadi saksi pertunjukan dan contoh buruk dari perilaku politik yang semakin pragmatis.

Terkait dengan

batas usia calon presiden dan wakil presiden, LaNyalla menekankan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan sejarah peradaban yang kaya. Oleh karena itu, pemimpin Indonesia seharusnya adalah individu yang matang dan dewasa secara usia. Dia menganggap penting untuk mempertimbangkan tradisi dalam pemahaman agama yang menekankan usia matang sebagai rujukan dalam memilih pemimpin.

Sebelumnya, Hakim MK Saldi Isra telah mengungkap peristiwa aneh dalam putusan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas lembaga Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan hukum. (*)



AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

MK Bentuk MKMK Selidiki Dugaan Pelanggaran Kode Etik



Ilustrasi (Antara)

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mengumumkan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. MKMK akan terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, dan hakim aktif, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27A UU MK (UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003).

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang menjabat pada periode 2003-2008, adalah salah satu anggota MKMK. Jimly juga pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) periode 2012-2017 dan saat ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta.

Anggota MKMK kedua adalah Bintang Saragih, seorang akademisi dan penasihat senior di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

(UPH).

Ia sebelumnya pernah menjadi anggota Dewan Etik MK tahun 2017-2020.

Anggota ketiga adalah Wahiduddin Adams, seorang hakim konstitusi aktif di MK. Saat ini, MK telah menerima tujuh laporan dari berbagai kelompok masyarakat dan advokat mengenai dugaan pelanggaran kode etik hakim MK dalam putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam perkara tersebut, MK pada tanggal 16 Oktober mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, mengubahnya menjadi usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Perkara ini diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, seorang warga negara Indonesia asal Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang mengusulkan perubahan syarat pencalonan capres dan cawapres. (*)



Jimly Asshiddiqie:

Belum Pernah *Image* MK Terpuruk Seperti Sekarang

Jimly Asshiddiqie resmi terpilih menjadi Ketua MKMK untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik di Mahkamah Konstitusi. Dikutip dari laman www.detiknews.com, ia mengungkapkan awalnya dia tidak bersedia menjadi Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Alasannya adalah khawatir akan adanya konflik kepentingan, terutama karena dia merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, beberapa pihak meyakinkannya bahwa tidak akan ada konflik kepentingan karena dia tidak akan mencalonkan diri dalam Pemilu 2024. Dengan alasan ini, Jimly akhirnya setuju untuk menjabat sebagai Ketua MKMK.



Jimly juga menyatakan bahwa sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan salah satu pendiri MK, dia merasa memiliki tanggung jawab sejarah. Dia ingin mendukung MK dan meningkatkan citranya, terutama setelah putusan yang mengabulkan permohonan uji materi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Jimly mengatakan, belum pernah image MK terpuruk seperti sekarang. Karena itu, ia terpanggil untuk membantu memulihkan reputasi MK.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat telah melaporkan Anwar Usman dan beberapa anggota MK lainnya ke MKMK terkait putusan yang memungkinkan kepala daerah mencalon-

kan diri sebagai presiden atau wakil presiden meskipun mereka belum mencapai usia 40 tahun. Jimly Asshiddiqie kemudian menjadi Ketua MKMK dan bertanggung jawab atas penanganan kasus ini.

Siapa Jimly?

Jimly Asshiddiqie adalah seorang figur terkemuka dalam hukum dan politik

Indonesia yang memiliki pengalaman luas dalam lembaga-lembaga penting, seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Kredibilitasnya dalam bidang hukum dan konstitusi telah

membuatnya dipercaya untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berikut adalah riwayat hidup ringkas Jimly Asshiddiqie.

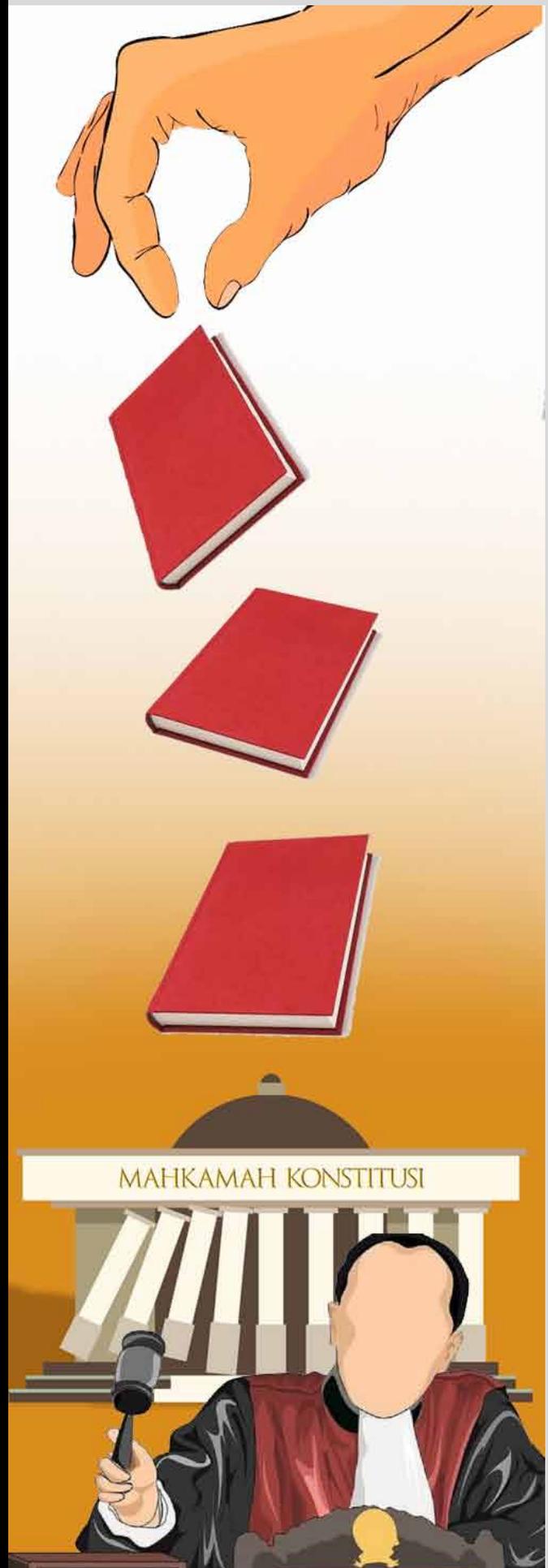
Jimly lahir pada 17 Agustus 1954 di Sumenep, Jawa Timur, Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Jimly Asshiddiqie menjadi seorang akademisi dan dosen hukum. Ia terlibat dalam pengajaran dan

penelitian hukum di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Salah satu posisi puncak dalam karir Jimly adalah ketika ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) selama periode 2003-2008. Sebagai Ketua MK, ia memiliki peran penting dalam memastikan keberlakuan hukum dan konstitusi di Indonesia. Setelah masa jabatannya di MK, Jimly Asshiddiqie menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) pada periode 2012-2017. DKPP bertanggung jawab untuk memastikan integritas dalam proses pemilihan umum di Indonesia. (*)

Pendapat Sembilan hakim MK dalam Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

1. **Hakim Anwar Usman:** Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun
2. **Guntur:** Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun
3. **Manahan:** Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun
4. **Enny:** Setuju Gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun
5. **Daniel:** Setuju Gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun
6. **Wahiduddin Adams:** menolak
7. **Saldi Isra:** menolak
8. **Arief Hidayat** menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima
9. **Suhartoyo** menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima.



Kembali ke UUD 1945 dengan Santun:

PROPOSAL DPD RI Mendapat Dukungan Luas



Proposal kenegaraan yang diusulkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mulai mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah organisasi kemasyarakatan, seperti Muhammadiyah, WALUBI, Pemuda Pancasila, dan terakhir Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia (FDICI), menyatakan mendukung pro-

posal tersebut demi kebaikan bangsa Indonesia ke depan. ICMI malah siap menyempurnakan proposal tersebut.

Di awal November ini, juga ada deklarasi Dewan Presidium Konstitusi yang disertai dengan Gerakan Pancasila Menganggil yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno. Bersama pimpinan DPD RI dan komponen masyarakat,

mereka juga akan mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Parlemen, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Tujuannya, untuk meminta MPR mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai fasafah bangsa dan norma hukum tertinggi dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam keterangannya dari Surabaya akhir Oktober lalu,



Ketua DPD RI, AA LaNyalla menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia yang sudah kian terbelenggu oleh kepentingan oligarki politik dan oligarki ekonomi. “Gerakan Pancasila memanggil adalah sebagai perwujudan kecintaan kami terhadap Indonesia. Dan gerakan ini murni untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak ada agenda dan kepentingan lain selain mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dasar dan norma hukum tertinggi dalam berbangsa dan bernegara di republik ini,” tegasnya.

Menurut LaNyalla, nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang sudah ada dan mewarnai kehidupan bangsa di Nusantara jauh sebelum Indonesia lahir. Oleh karena itu, para pendiri bangsa bersepakat bahwa sistem bernegara Indonesia adalah sistem tersendiri. Bukan sistem liberal yang individualis, dan juga bukan sistem komunis yang berbasis kelas. “Manusia Indonesia adalah manusia monodualis, sehingga ada keselarasan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Karena kemerdekaan yang diperjuangkan Indonesia adalah kemerdekaan bangsa. Bukan kebebasan individu. Sehingga sistem demokrasi Pancasila yang diwujudkan dalam sistem bernegara oleh pendiri bangsa itulah yang harus kita jalankan,” kata LaNyalla.

Amendemen UUD 1945 tahun 1999-2002 yang telah mengubah sistem bernegara dan meninggalkan Pancasila, harus kita dikoreksi kembali dengan cara mengembalikan UUD 1945 naskah asli 18 Agustus 1945, lalu kemudian lakukan amendemen dengan teknik addendum. “Kita hanya menyempurnakan dan memperkuat kedaulatan rakyat, tanpa mengubah sistem bernegara. In-sya Allah Indonesia semakin berdaulat, adil, dan makmur,” tutur anggota DPD RI asal Jawa Timur ini. (*)

Ini yang Dimaksud dengan Teknik Adendum

Amendemen UUD 1945 dengan teknik adendum adalah proses perubahan atau penyesuaian UUD 1945 dengan menambahkan atau memasukkan tambahan pasal-pasal baru ke dalam naskah asli UUD 1945 tanpa menggantikan atau menghilangkan pasal-pasal yang sudah ada. Dalam konteks ini, “adendum” merujuk pada tambahan atau perubahan yang disisipkan ke dalam dokumen asli tanpa mengganti sepenuhnya.

Dalam konteks amendemen UUD 1945, teknik adendum bertujuan untuk memperkuat, menyempurnakan, atau mengoreksi aspek-aspek tertentu dalam konstitusi tanpa mengganti seluruh kerangka dasar UUD 1945. Ini berarti kerangka dasar dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 tetap dipertahankan, sementara perubahan atau tambahan tertentu diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan atau kebutuhan tertentu yang timbul seiring waktu.

Dengan menggunakan teknik adendum, amendemen UUD 1945 akan lebih berfokus pada aspek-aspek yang perlu diperbarui atau disempurnakan, seperti regulasi ekonomi, sistem politik, hak asasi manusia, tata pemerintahan, atau isu-isu sosial yang relevan. Proses ini memungkinkan untuk menjaga konsistensi dan stabilitas kerangka dasar UUD 1945 sambil tetap mengakomodasi perkembangan dan perubahan dalam masyarakat dan pemerintahan. (*)





LaNyalla Minta Forum Doktor Kawal Proses Desakan ke MPR

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk berjuang sepenuhnya mengembalikan UUD 45 kepada naskah asli, yang kemudian akan disempurnakan melalui amendemen dengan teknik adendum. Hal ini disampaikan LaNyalla dalam seminar yang digelar oleh Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia (FDCI) dengan tema “Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Rumusan Pendiri Bangsa” di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, akhir Oktober 2023.

Dalam perjuangan ini, LaNyalla mengaku tidak ingin mengorbankan siapa pun, bahkan jika harus sampai terjadi keributan. Namun, LaNyalla berharap semangat untuk mengembalikan UUD 45 ke naskah asli dapat diperjuangkan dengan cara yang santun dan baik.

“Saya perlu dukungan dari rakyat, termasuk Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia di sini. Saya tidak ingin mengorbankan siapa pun. Saya tidak ingin ada keributan di negara kita. Kita hanya ingin mengembalikan dengan

cara yang santun dan baik, kemudian semua legowo, tanpa ada keributan,” kata LaNyalla dengan semangat.

LaNyalla mengajak semua pihak untuk menggunakan akal, pikir, dan dzikir dalam memperjuangkan tujuan ini. Dia tidak ingin peristiwa seperti yang terjadi pada tahun 1998 terulang, apalagi sampai menimbulkan korban. LaNyalla berharap proses ini akan berlangsung atas kesadaran kolektif bangsa bahwa sistem yang ada saat ini memiliki kekurangan. Kesadaran ini harus tumbuh sebagai warisan dari individu yang memiliki pemikiran yang bijaksana dan jernih.

Dengan kesadaran kolektif rakyat, diharapkan mereka dapat memberikan tekanan kepada MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa dengan agenda tunggal, yaitu mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan naskah asli, yang kemudian dapat diamendemen kembali dengan teknik yang benar, yaitu teknik adendum, tanpa mengubah sistem bernegara yang ada. (*)





Ini Tanggapan FDCI Tentang Proposal Kenegaraan DPD RI



Pembina Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia (FDCI), Prof. Hafid Abbas, mengatakan bahwa amendemen Konstitusi UUD 1945 antara tahun 1999-2002 telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan orientasi politik yang liberal yang ditentukan oleh prinsip hukum Darwin, “*survival of the fittest*,” di mana yang kuatlah yang menang dan menguasai segalanya. “Indonesia berada dalam cengkeraman oligarki politik dan ekonomi yang telah menciptakan ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang menjadi yang terburuk keempat di dunia, sehingga negara ini terancam disintegrasi,” ungkap Abbas saat berbicara dalam seminar FDCI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada akhir Oktober 2023.

Sementara itu, Dr. Mulyadi Opu Andi Tadampali, seorang dosen di FISIP UI dan narasumber dalam seminar tersebut, menyatakan bahwa sebagai seorang akademisi, dia tidak memiliki dasar ilmiah untuk menolak proposal dari DPD RI yang ingin mengembalikan UUD 1945 ke teks aslinya. “Artinya, saya mendukung gagasan ini. Bahkan menurut saya, siapa pun yang ingin mempertahankan model negara seperti sekarang adalah pihak yang sebenarnya ingin merusak negara sendiri,” tegasnya.



Dr. Mulyadi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah dijajah, melainkan bangsa-bangsa seperti bangsa Batak, Aceh, Jawa, dan lainnya yang dijajah. “Ini berarti bahwa Indonesia dibentuk oleh gabungan negara dan bangsa lama, dan oleh karena itu, mereka yang membentuk negara ini layak dihormati. Sekarang, DPD RI mengusulkan agar para raja dan sultan Nusantara duduk di MPR sebagai utusan daerah. Mengapa hal ini harus dipersoalkan?” tambahnya.

Ekonom yang juga seorang pengamat politik, Dr. Ichsanuddin Noorsy, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan kerancuan dalam proses amendemen UUD 1945 antara tahun 1999-2002. Hasil perubahan UUD 1945 pada periode tersebut mengandung kontradiksi, baik dalam hal konsep maupun praktik ketatanegaraan. “Menurut komisi konstitusi pada tahun 2002, ada inkonsistensi baik secara yuridis maupun konseptual. Selain itu, ketiadaan kerangka acuan atau naskah akademik dalam perubahan UUD 1945 merupakan salah satu penyebab inkonsistensi konseptual dan teoritis dalam mengatur materi UUD,” katanya.



Menurut Noorsy, UUD 2002 tidak akan membawa bangsa ini menuju keselamatan dan kebahagiaan, yang seharusnya menjadi tujuan utama manusia. “Oleh karena itu, usulan 5 Proposal dari DPD RI perlu dijadikan pedoman oleh semua pihak untuk mencapai tujuan sejati kemanusiaan. Semoga kita bisa mengakhiri kebingungan ini dengan kembali kepada UUD 1945,” lanjutnya.



Di tempat yang sama, Dr. Iramadi Irdja, seorang anggota FDCI, menyatakan bahwa persoalan bangsa hanya dapat diatasi dengan kembali ke UUD 1945. Setidaknya ada tiga masalah yang dapat diatasi dengan langkah ini. Pertama, persoalan oligarki yang sangat meresahkan di negara ini. Oligarki bukan hanya berpusat di dalam negeri, tetapi juga telah menyebar ke luar negeri, terutama ke Tiongkok atau ‘Mbah’nya oligarki. Kedua, adalah masalah utang, dan ketiga, adalah bangkitnya komunisme di Indonesia.



Sementara itu, Marsekal Pertama TNI (Purn) Prof. Dr. Achmad Dirwan, anggota FDCI lainnya, pada dasarnya setuju dengan proposal kenegaraan dari DPD RI yang bertujuan untuk meningkatkan perbaikan regulasi dan aspek lainnya dalam negara. Dia juga setuju dengan perlunya keterwakilan dari organisasi atau profesi tertentu dalam MPR. Menurutnya, sangat penting untuk memiliki individu yang kompeten dan berpengalaman di bidang mereka. “Saya telah melihat sendiri bagaimana ada anggota dewan yang bisa dibilang tidak memiliki kapasitas, tetapi dapat duduk sebagai wakil rakyat. Semua itu karena memiliki sumber daya finansial. Dengan kata lain, mereka yang memiliki uang, meskipun kurang berpengetahuan, dengan mudah bisa menjadi anggota DPR. Padahal, mereka adalah pembuat undang-undang yang mengikat seluruh rakyat,” ujarnya. (*)

PERNYATAAN SIKAP FORUM DOKTOR DAN CENDEKIAWAN INDONESIA



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kiri) menerima pernyataan sikap FDCI dari pembinanya, Prof. Hafis Abbas. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

Kami Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia (FDCI) sebagai wadah para ilmuwan, akademisi, peneliti dan cendekiawan dari berbagai bidang keilmuan dan profesi yang tersebar di seluruh wilayah tanah air telah mengamati secara saksama bahwa: setelah UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 diamendemen sebanyak empat kali, dari kurun waktu 1999 hingga 2002, Indonesia terlihat semakin menjauh dari Pancasila dan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi.

Bahkan sebaliknya, melalui UUD 1945 hasil amendemen tersebut, Indonesia terlihat telah menjadi negara yang berhaluan

politik liberal yang didikte oleh Hukum Darwin, *Survival of The Fittest*, yang kuatlah yang menang dan menguasai segalanya. Akibatnya, kini Indonesia sungguh-sungguh berada dalam genggaman oligarki politik dan ekonomi yang telah melahirkan kesenjangan sosial ekonomi yang keempat terburuk di dunia, sehingga negeri ini terbawa pada ancaman disintegrasi.

Bertolak dari kenyataan itu, Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia menyampaikan sikap mendukung prakarsa dan upaya DPD RI untuk membangun kesadaran kolektif dengan menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa dengan cara kembali kepada UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

Berikut pernyataan sikap dari Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia (FDCI) yang dibacakan Prof. Hafid Abbas.



Pertama, mendukung sepenuhnya prakarsa dan upaya DPD RI untuk membangun kesadaran kolektif dengan menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa dengan cara kembali kepada UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, untuk kemudian dilakukan amendemen dengan teknik adendum.

Kedua, mendukung Proposal Kenegaraan DPD RI sesuai dengan Naskah Akademik yang berisi penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara melalui Lima Usulan, yang secara garis besar adalah:

1. Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan. Yang menampung semua elemen bangsa. Yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan.
2. Membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan selain dari anggota partai politik sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan kelompok partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas oleh keterwakilan masyarakat non-partai.
3. Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah. Bukan penunjukan oleh Presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang mengacu kepada kesejarahan wilayah yang berbasis kepada negaranegara lama dan bangsa-bangsa lama yang ada di Nusantara, yaitu para Raja dan Sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Sedangkan Utusan Golongan diisi oleh Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki kesejarahan dan bobot kontribusi bagi pemajuan ekonomi, so-

sial, budaya, pertahanan keamanan dan agama bagi Indonesia.

4. Memberikan kewenangan kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh.
5. Menempatkan secara tepat, tugas, peran dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan.

Ketiga, untuk menghindari pembahasan yang melebar dan terjadinya perubahan tanpa arah. Berikut lima butir kesepakatan dasar (*common denominators*) berkaitan dengan arah amendemen UUD 1945 tersebut:

1. Tidak Mengubah Naskah Pembukaan UUD 1945. Karena di dalam naskah pembukaan UUD 1945 terdapat falsafah dan asas serta ideologi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sekaligus tujuan kemerdekaan dan cita-cita negara.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak berdirinya negara Indonesia.
3. Melakukan amendemen dengan teknik adendum. Ini dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli, BAB dan Pasal-Pasal UUD 1945. Naskah adendum UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.
4. Penjelasan dan naskah adendum UUD 1945 menjadi satu kesatuan konstitusi, yang terdiri dari: Pembukaan, Batang Tubuh, yaitu BAB dan Pasal-Pasal, dan Penjelasan serta addendum amendemen.
5. Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial dalam sistem mandataris, dengan tetap menempatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan penjelmaan seluruh elemen bangsa. (*)



AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Haedar Nashir (tengah) dan Anwar Abbas dari PP Muhammadiyah di Jakarta. (Foto: Biro PHM Setejen DPD RI)

PP Muhammadiyah Dukung DPD RI: TERUSKAN GAGASAN KOREKSI SISTEM BERNEGARA



Pertemuan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haedar Nashir, meminta Ketua DPD RI untuk meneruskan gagasan agar bangsa dan negara ini kembali kepada sistem bernegara dengan asas dan sistem Pancasila, yang selama ini telah diinisiasi oleh DPD RI. Haedar Nashir mengungkapkan hal ini saat menerima

an berbentuk proposal perbaikan sistem bernegara hasil telaah DPD RI dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah telah melakukan kajian selama beberapa tahun, yang tertuang dalam buku-buku seperti “Revitalisasi dan Karakter Bangsa” pada tahun 2007, “Indonesia

kemaslahatan dan kesaksian. “Muhammadiyah berhasil menemukan titik temu antara keislaman dan kehidupan berbangsa, di mana agama menjadi ruh spiritual dalam kehidupan bernegara dalam konteks Bhineka Tunggal Ika,” paparnya.

Haedar Nashir mengapresiasi reformasi, meskipun menyatakan bahwa reformasi mengalami perubahan yang tidak diinginkan, seperti perubahan dalam sistem kekuasaan.

Dia menganggap perlu upaya terus-menerus untuk mewujudkan perubahan fundamental dalam sistem bernegara.

Terkait dengan MPR dan DPR, Haedar Nashir mengusulkan bahwa perubahan ini dapat diperjuangkan sebagai proposal penyempurnaan dan penguatan sistem, dengan penekanan pada representativitas sebagai penjelmaan rakyat.

Silaturahmi Ketua DPD RI bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif seluruh komponen bangsa dalam mendorong terwujudnya Konsensus Nasional agar bangsa dan negara ini kembali kepada sistem bernegara dengan asas dan sistem Pancasila. (*)

kunjungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah anggota DPD RI di Gedung PP Muhammadiyah, kawasan Salemba, Jakarta, pada akhir Oktober 2023.

Menurut Haedar Nashir, ada titik temu antara gagasan

Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna” pada tahun 2014, dan dokumen resmi “Pancasila Darul Ahdi Wa Syahadah” pada tahun 2015.

Pancasila sebagai Darul Ahdi dan Wa Syahadah, kata Haedar, berarti negeri yang bersepakat pada



ICMI Janji akan Perkuat Proposal DPD RI



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama pengurus ICMI di Jakarta. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) telah memberikan apresiasi terhadap proposal kenegaraan yang diajukan oleh DPD RI dan berkomitmen untuk membentuk forum diskusi khusus guna memperkuat proposal tersebut. Ketua Umum ICMI, Profesor Arif Satria, menyatakan niat ini saat bertemu dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Kantor ICMI Pusat pertengahan Oktober 2023.

ICMI, sebagai lembaga intelektual, merasa memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan generasi masa depan dan merespons berbagai isu, termasuk mengenai struktur kenegaraan. Prof Arif mengungkapkan bahwa setelah 20 tahun reformasi, saatnya untuk melakukan evaluasi dan memetik hikmah dari proses tersebut.

Lebih lanjut, Prof Arif menyatakan apresiasi terhadap DPD RI yang telah berkomitmen dalam menjaga dan merawat bangsa dalam format yang sesuai dengan kondisi masa kini dan masa depan. “Sistem politik yang ada saat ini perlu dievaluasi karena demokrasi telah berkembang menjadi demokrasi yang hanya fokus pada angka dan pimpinan elektoral, bukan pada substansi,” kata Arif sembari menekankan perlunya koreksi untuk perbaikan bangsa ke depan.

Prof Arif juga mengungkapkan bahwa bangsa ini belum matang secara politik dan ekonomi, yang seharusnya menjadi hal penting dalam memperkuat bangsa. Ia memandang bahwa sistem politik dan ekonomi harus dibahas secara serius dalam forum yang akan dibentuk oleh ICMI

guna memperkuat proposal kenegaraan dari DPD RI.

Andi Faisal Bakti, Direktur CIDES (Center for Information and Development Studies) ICMI, menekankan bahwa bangsa ini telah menjauh dari implementasi Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Ia menyatakan bahwa penting untuk melakukan evaluasi mengenai hal ini.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik tawaran dari ICMI untuk membentuk forum khusus guna membahas proposal kenegaraan secara detail. LaNyalla menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam perbaikan arah bangsa ke depan dan mengapresiasi pandangan yang sama dari ICMI mengenai kondisi sistem bernegara yang telah melencong dari cita-cita para pendiri bangsa. (*)



WALUBI Desak Konsensus Nasional Kembali ke UUD 1945



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Ketua Umum WALUBI Hartati Murdaya (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Perwakilan Umat Buddha Seluruh Indonesia (WALUBI) menyatakan siap bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan berbagai elemen masyarakat lain dalam menyerukan terbentuknya konsensus nasional untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli, yang nantinya akan disempurnakan melalui amendemen dengan teknik adendum.

Ketua Umum WALUBI, Hartati Murdaya, menyampaikan dukungan ini dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di kantor WALUBI, Jakarta Pusat, pertengahan Oktober 2023. Hartati menegaskan bahwa WALUBI dan DPD RI memiliki kesamaan pandangan dalam memper-

kuat dan menyempurnakan sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. “WALUBI memahami bahwa inisiatif DPD RI sangat penting bagi bangsa, namun harus dilakukan dengan damai,” kata Hartati.

Hartati Murdaya menekankan pentingnya langkah-langkah yang diambil untuk tidak menyebabkan kerusuhan di masyarakat yang dapat mengganggu pembangunan bangsa. Ia menyuarakan pentingnya menjaga ketenangan sehingga pembangunan dapat berlanjut dan investasi dapat mengalir, yang akan menjadi warisan untuk generasi mendatang.

Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli adalah penting karena konstitusi tersebut merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang me-

mahami keragaman dan murni untuk kepentingan rakyat. Hartati menyoroti bahwa konstitusi saat ini dan turunannya, termasuk UU Cipta Kerja, banyak mengandung kontradiksi dan tidak cukup berpihak kepada rakyat.

Hartati Murdaya memberikan dukungan kepada perjuangan DPD RI untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli dan berharap implementasinya akan lebih baik. Ia juga menekankan pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam perjuangan ini, sambil menginstruksikan jajaran WALUBI untuk menyosialisasikan dan menggaungkan gagasan ini ke seluruh Indonesia. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi langkah WALUBI yang telah menyampaikan aspirasi ini. (*)



Kaji dan Tinjau Ulang Sistem Bernegara!

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (ketiga dari kanan) dalam acara Musyawarah Cabang (Muscab) Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Surabaya. (Foto: LaNyalla Centre)

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menekankan pentingnya bagi kader Pemuda Pancasila untuk mengkaji dan meninjau ulang sistem bernegara Indonesia saat ini. LaNyalla menganggap bahwa praktik ketatanegaraan saat ini telah menjauh dari nilai-nilai Pancasila, yang merupakan falsafah dasar bangsa.

Menurutnya, reformasi dan amendemen konstitusi tahun 1999-2002 telah mengubah konstitusi Indonesia secara signifikan, meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Hal ini berdampak pada ekonomi yang semakin kapitalistik dan hilangnya se-

mangat gotong-royong dalam masyarakat.

Saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Surabaya, di Balai Pemuda Kota Surabaya, akhir Oktober 2023, LaNyalla menegaskan bahwa Pemuda Pancasila harus memahami perubahan ini dan bekerja untuk mengembalikan sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan visi para pendiri bangsa.

“Demokrasi saat ini lebih menekankan kedaulatan partai politik daripada kedaulatan rakyat, dan di bidang ekonomi pertumbuhan telah menggantikan pemerataan dan kesejahteraan. Kedaulatan negara dan kekuatan ekonomi pun menjadi lemah, menghadapi tan-

tangan masa depan yang kompleks,” katanya.

LaNyalla menekankan perlunya mengkaji dan meninjau ulang sistem bernegara, mencari solusi untuk mengembalikan negara ke rumusan asli sistem bernegara Pancasila. DPD RI juga berupaya mengajukan proposal kenegaraan untuk menguatkan sistem bernegara sesuai visi para pendiri bangsa. Ia mengajak kader Pemuda Pancasila untuk menyuarakan hal ini kepada seluruh *stakeholder* bangsa, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dan mempelajari Proposal Kenegaraan yang diajukan oleh DPD RI untuk menghindari penyimpangan praktik ketatanegaraan. (*)

DPD RI Tekankan Sosialisasi Lima Proposal Kenegaraan

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, dengan penuh semangat pada pembukaan Masa Sidang II DPD RI Tahun 2023-2024 di Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, akhir Oktober 2023, menyampaikan komitmen DPD RI dalam upaya memasyarakatkan keputusan terkait pemulih-an dan penerapan sistem bernegara Pancasila, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, yang diperkuat melalui teknik adendum konstitusi. Pimpinan DPD RI telah memulai langkah konkret dengan melakukan kunjungan silaturahmi dan pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional serta berbagai elemen masyarakat.

“Pimpinan dan Anggota DPD RI kini memiliki tugas penting, yakni menyosialisasikan keputusan DPD RI ini. Kita akan menghadirkannya dalam setiap kunjungan kerja, kegiatan pengawasan, *focus-group discussions (FGD)*, serta berbagai dialog penting, baik di ibu kota negara maupun di daerah. Tujuannya jelas, kita akan merinci dan membahas Lima Proposal Kenegaraan DPD RI,” ungkap Nono Sampono, didampingi Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, dan Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, pada pembukaan Masa Sidang II tersebut.

Pada Sidang Paripurna DPD RI itu, agen-

da utama mencakup tiga poin kunci, yakni; pembukaan masa sidang II tahun 2023-2024, pidato pembukaan yang menjadi panduan dan visi masa sidang ke depan, dan yang tak kalah penting, laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan masing-masing.

Nono Sampono me-



negaskan harapannya, terutama kepada Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV, dan alat kelengkapan non Komite DPD RI, untuk merancang program prioritas kerja yang senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat dan daerah. Selain itu, juga menyelesaikan target kerja yang belum terselesaikan dari tahun sidang sebelumnya.

Di momen ini, sejumlah Anggota DPD RI dari seluruh provinsi dengan penuh semangat menyajikan laporan kegiatan mereka selama reses ke daerah masing-masing. Sebuah langkah yang menunjukkan komitmen mereka dalam mewujudkan visi besar DPD RI ke depan. (*)

Beragam Laporan dari Daerah: Dari Lapas Hingga Penurunan Status Bandara Supadio

Dalam laporan dari daerah pemilihan, Anggota DPD RI yang mewakili Provinsi Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, membeberkan hasil pengawasannya yang mengungkap berbagai permasalahan dalam persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Salah satu sorotannya adalah kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Jawa Tengah yang tengah berada dalam kondisi genting, dengan jumlah tahanan melebihi kapasitas yang ada. Dengan total 20 rutan dan 24 lapas, situasi ini dapat memicu potensi konflik di balik jeruji jika tidak segera ditangani secara efektif.



Di sisi lain, Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara, Matheus Stefi Pasimanjeku, mengungkap permasalahan krisis pangan yang dihadapi Maluku Utara, terutama dalam pasokan beras. Dengan pasokan yang minim, ia mengajukan permohonan kepada DPD RI untuk mendesak pemerintah agar segera mengirimkan bantuan pasokan beras ke wilayah tersebut, dengan harapan untuk mengatasi ketidakcukupan pangan yang tengah mengancam kesejahteraan penduduk.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan, Lily Amelia Salurapa, mengungkapkan upaya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggenjot sektor pariwisata untuk mendorong perekonomian. Dengan mempromosikan keunikan dan kekhasan setiap daerah di Sulawesi Selatan, mereka berharap bisa menjadi magnet bagi wisatawan yang mulai berani berkeliling pasca pandemi Covid-19.



Sementara itu, Anggota DPD RI yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat, Erlinawati, mengungkap kekhawatirannya terhadap perubahan status Bandara Supadio yang berubah dari internasional menjadi domestik. Ia menyoroti potensi dampak penurunan status ini, termasuk menurunnya minat wisatawan dan investasi yang dapat merugikan daerah tersebut.



Pada akhir sidang paripurna yang penuh beragam laporan ini, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, mengapresiasi keras kinerja seluruh Anggota DPD RI yang telah berjuang untuk mewakili aspirasi masyarakat dan berdedikasi pada daerah masing-masing. “Semua aspirasi yang terungkap akan diolah oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dan dipersembahkan kembali kepada masing-masing Komite untuk tindak lanjut sesuai dengan bidang tugas dan prioritas yang ada,” tutup Sultan. (*)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menerima kunjungan delegasi dari The Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) yang dipimpin Ketuanya HE Nurlan Abdimajin di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, pertengahan Oktober 2023. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan melepas atlet wushu Kontingen Jawa Timur (Jatim) di Surabaya sebelum berangkat untuk berlaga di ajang Pra PON 2023 di Bogor, Jawa Barat. (Foto: LaNyalla Centre)



Rombongan Komite II DPD RI diajak foto bersama di pinggir pantai di salah satu ditrik di Provinsi Papua Barat Daya usai melakukan Rapat Kerja pertengahan Oktober lalu dengan pihak terkait di daerah itu untuk mengadvokasi masalah jaringan listrik. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

HUT KE-19 DPD RI 2023

Pada tanggal 1 Oktober, DPD RI merayakan ulang tahunnya yang ke-19. Tepat 19 tahun yang lalu, pada hari tersebut, DPD RI berdiri tegak dengan pengambilan sumpah jabatan anggotanya yang pertama. Peringatan HUT ke-19 DPD RI tahun ini dihelat dengan penuh kehikmatan dan meriah di pelataran gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi momen istimewa, ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, dan tumpeng pertama diserahkan kepada Sekjen DPD RI, Rahman Hadi. Hadir pula Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dan Mahyudin, serta sejumlah anggota DPD RI dan jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI. Foto-foto indah dari acara ini tertangkap oleh Biro PHM Setjen DPD RI, mengabadikan momen bersejarah ini untuk dikenang. Selamat ulang tahun yang ke-19, DPD RI!



TIDAK BISA DIBIARKAN Pinjol Menyengsarakan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU) untuk tidak membiarkan sistem pinjaman *online* (Pinjol) yang menerapkan bunga tinggi, karena sangat menyengsarakan rakyat.

Ia menduga bahwa tingkat bunga tersebut merupakan hasil kesepakatan kartel yang ditentukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Meskipun bunga tinggi, banyak konsumen tetap tertarik karena proses peminjaman yang mudah. Namun, hal ini telah menciptakan masalah sosial baru di tengah masyarakat karena dampak meresahkannya.

LaNyalla menekankan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. “Saya meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan terbuka terhadap bisnis pinjaman *online* yang kini meresahkan banyak pihak,” ungkapnya saat kegiatan reses di Jawa Timur, Oktober lalu. Ia menyebut bahwa bisnis pinjaman *online* menawarkan tenor pengembalian yang cepat dengan bunga flat yang awalnya 0,8% per hari dan sekarang turun menjadi 0,4% per hari.

Namun, yang menjadi sorotan adalah penetapan suku bunga tersebut oleh AFPI.

LaNyalla menyoroti, “Siapa sebenarnya AFPI ini? Bisnis pinjaman daring memang misterius, namun terus berkembang pesat.” Ia mengkritik ketiadaan transparansi terkait penetapan bunga sehingga calon konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang lengkap.

LaNyalla juga memaparkan kerugian yang

dirasakan oleh konsumen. Jika dikalkulasi, bunga 0,4% per hari akan mencapai 12% per bulan. Dalam setahun, dengan bunga sederhana, angka ini mencapai 144% dan bahkan bisa mencapai 290% jika dihitung dengan bunga majemuk. “Ini berarti, jika seseorang meminjam Rp1 juta, dalam enam bulan atau satu tahun mereka harus mengembalikan

**AWAS KENA JEBAKAN
PINJOL ILEGAL**

Bedakan antara Fintech Lending Legal yang berizin OJK dan Pinjol Ilegal

Cek Legalitas Izin Pinjaman Online ke OJK:
 • Kontak OJK 157
 • Whatsapp 081 157 157 157
 • Daftar Fintech Lending yang legal bisa dilihat di bit.ly/daftarfintechlendingOJK

Jangan Klik Tautan yang Dikirim Pinjol Ilegal via SMS, Whatsapp, Email, atau Sarana Komunikasi lain

Hati-hati terhadap Modus Pinjol Ilegal yang Menggunakan Nama atau Logo yang Menyerupai Fintech Lending Legal

Gunakan hanya Aplikasi Resmi dari Sumber Resmi

CERMAT DAN BIJAK MENGGUNAKAN PINJAMAN ONLINE YUK!

www.ojk.go.id | @ojkindonesia | officialojk | Jasa Keuangan | Kontak OJK 157

hingga Rp3,9 juta,” jelasnya.

Menurutnya, praktik bisnis ini mirip dengan lintah darat dan sudah tidak sehat lagi. Meskipun diklaim diawasi oleh OJK, nyatanya bisnis pinjol ini tidak menunjukkan laporan keuangan la-yaknya lembaga perbankan. Tak hanya itu, tidak ada pengumuman resmi terkait suku bunga yang diterapkan. “Pinjol sejatinya adalah predator yang memanfaatkan kesulitan masyarakat. Tindakan tegas harus segera dilakukan, dan saya berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU segera bertindak,” pungkas LaNyalla. (*)

Senator Filep Apresiasi Pj Gubernur PBD



Sejumlah pelajar asal Papua. (Foto: TSE Group)

Senator Papua Barat Filep Wamafma, memberikan apresiasi terhadap langkah Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad, yang telah menyalurkan dana hibah pendidikan dari Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp11,1 miliar kepada sejumlah perguruan tinggi dan yayasan di Sorong. Langkah ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam memajukan pendidikan di wilayahnya.

Pj Gubernur PBD Mohammad Mus'ad menyatakan, penyaluran dana hibah ini sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan ke-

dua atas UU Otonomi Khusus. Selain itu, Pemprov PBD juga berkomitmen memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa berprestasi, dengan kriteria 80 persen untuk orang asli Papua dan 20 persen untuk non-orang asli Papua.

Di lain pihak, Filep menyoroti ketidaktransparanan Provinsi Papua Barat, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Paulus Waterpauw, dalam hal pendistribusian bantuan hibah pendidikan. Menurutnya, seharusnya dengan alokasi anggaran yang besar, Papua Barat bisa lebih mudah menetapkan kebijakan pendidikan yang progresif.

Filep pun mengkritik kebijakan Otsus yang belum sepenuhnya dioptimalkan, terutama dalam sektor pendidikan. "Pendidikan adalah investasi masa depan. Namun, bagaimana kita bisa bicara peningkatan SDM kalau pemimpin di daerah tidak merancang kebijakan yang tepat?" ungkap Filep.

Senator ini menekankan bahwa kritik terhadap Otsus seharusnya ditujukan kepada pejabat yang mengelola anggaran, dan meminta penegak hukum untuk mengawasi realisasi Dana Otsus. Filep berharap agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pendidikan di Papua Barat. (*)

LaNyalla Dukung Upaya Kemnaker Lindungi Ojol



Ilustrasi Ojol (Foto: Otosia.com)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan dukungannya terhadap upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang sedang menyusun aturan perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol). Menurut LaNyalla, fokus utama bukan pada pembatasan jam kerja, tetapi pada hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator, termasuk mengenai biaya potongan yang mempengaruhi penghasilan pengemudi.

LaNyalla menekankan kontribusi besar pengemudi ojol terhadap bangsa, seperti mempermudah aktivitas masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Dia menilai bahwa keberadaan mereka harus dipandang sebagai modal sosial bagi negara. Berdasarkan data, pengemudi ojek online di Indonesia berjumlah lebih dari 4 juta orang, sehingga regulasi ini dianggap esensial untuk melindungi kepentingan banyak pihak.

“Ketika terjadi satu permasalahan, pengemudi ojek online selalu menjadi pihak yang paling lemah. Padahal skema kerja antara pengemudi dengan aplikator seharusnya diatur dan dilindungi oleh regulasi. Sehingga dapat dipastikan adanya keadilan ekonomi,” kata LaNyalla.

Adapun perlindungan yang diperlukan, menurut LaNyalla, meliputi jaminan penghasilan yang layak dan

jaminan sosial serta kesehatan. Selama ini, banyak pengemudi ojol berada dalam posisi yang lemah, terutama saat ada permasalahan dengan aplikator.

Mengambil contoh dari kebijakan Gojek di Singapura, yang menurunkan komisi bagi mitra pengemudi dari 15% menjadi 10%, LaNyalla berpendapat bahwa Indonesia perlu mengambil inspirasi dari hal tersebut. Terakhir, ia menambahkan bahwa beberapa aturan yang sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan meliputi batas usia minimal pengemudi, kepemilikan SIM dan STNK, serta kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)



Mengajak Generasi Muda Terlibat di Kancah Politik

Anggota DPD RI Tansil Linrung saat membuka acara Konferensi Pemuda Parlemen di Ruang Rapat Komisi II DPR RI akhir Oktober 2023. (Foto: Biro PHM Sejten DPD RI)

Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, mendorong generasi muda Indonesia untuk aktif terlibat dalam politik. Dia percaya bahwa keterlibatan pemuda dapat meningkatkan citra parlemen dan eksekutif di Indonesia, yang selama ini sering dipandang negatif oleh masyarakat. Tamsil berbicara saat membuka acara Konferensi Pemuda Parlemen di Ruang Rapat Komisi II DPR RI pada akhir Oktober 2023.

Menurut Tamsil, citra politik di Indonesia saat ini cenderung buruk, dan hal ini telah membuat kaum milenial menjadi apatis terhadap dunia politik. Dia berpendapat bahwa melibatkan generasi muda

dapat menciptakan pemimpin yang lebih berkualitas untuk mengisi lembaga parlemen dan eksekutif di Indonesia. Tamsil berharap agar keterlibatan pemuda didasarkan pada kompetensi dan kemampuan mereka dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan dunia politik.

“Kita perlu dorong mereka agar politik tidak seperti yang dikesankan selama ini, politik itu kotor, toh tidak membawa apa-apa, ini keliru. Ini perlu disampaikan ke generasi muda, supaya mengambil peran agar parlemen ini diisi oleh politisi-politisi yang bisa membawa citra yang lebih positif bagi parlemen,” ucapnya.

Tamsil juga menekankan pentingnya peran politisi

dalam merumuskan kebijakan yang memengaruhi nasib rakyat Indonesia, seperti harga bahan pokok, bahan bakar minyak, dan anggaran pendidikan. Dengan terlibat dalam politik, pemuda dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Acara Konferensi Pemuda Parlemen ini juga dihadiri oleh Founder Pemuda Parlemen, Khaeria Ulfarani Rahman, yang menyatakan bahwa organisasi mereka mewakili 38 provinsi di Indonesia dan bertujuan menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Mereka berencana untuk menyampaikan gagasan, kritikan, dan solusi kreatif kepada pemimpin, dengan dukungan dari anggota parlemen. (*)



Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti

Ketua DPD RI
Pimpinan Lembaga Peduli Pembangunan Daerah

Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Terima KWP Award 2023



H. Sultan Baktiar Najamudin

Wakil Ketua DPD RI
Senator Kritis dan Pro Demokrasi

Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keanggotaan KWP Erwin S Siregar saat menyerahkan penghargaan KWP Award untuk Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang diwakili Sekjen DPD RI Rahman Hadi (kanan).
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima penghargaan KWP Award 2023 dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, awal Oktober 2023. KWP Award 2023 merupakan sebuah ajang penghargaan yang diberikan kepada legislator dan mitra kerja mereka. Pada tahun ini, acara tersebut mengusung tema ‘Membangun Sinergitas KWP dengan MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan Kementerian/Lembaga dalam Mewujudkan Parlemen Modern’.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dianugerahi KWP Award 2023 dalam kategori “Pimpinan Lembaga Peduli Pembangunan Daerah” yang penerimaannya diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi. Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima penghargaan dalam kategori “Senator Kritis Pro Demokrasi” yang penerimaannya diwakili oleh Deputy Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin.

Ketua KWP Ariawan menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan oleh jurnalis dan wartawan yang tergabung dalam lingkungan MPR/DPR/DPD RI kepada para legislator DPR RI, senator/Anggota DPD RI, dan mitra kerja parlemen. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja anggota dewan dan memperkuat hubungan kerja sama antara KWP dan parlemen.

Ariawan juga menambahkan bahwa KWP AWARD telah diselenggarakan sejak tahun 2021, yang diinisiasi oleh Ketua KWP periode 2020-2022, Marlen Erikson Sitompul. Pada awalnya, KWP AWARD fokus pada penilaian kinerja legislator DPR RI, yang juga menjadi indikator keberpihakan dan keterwakilan mereka di Senayan dalam menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat dan daerah pemilihan.

Dengan demikian, penghargaan KWP Award 2023 menjadi penghormatan atas kontribusi penting yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPD RI serta seluruh anggota parlemen dalam memajukan parlemen *modern* dan mewujudkan tugas mereka dalam melayani masyarakat dan daerah pemilihan mereka. (*)

Pengiriman Pelajar Indonesia ke Mesir Diperbincangkan

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama sejumlah anggota DPD RI, baru-baru ini menggelar rapat koordinasi dengan Duta Besar Indonesia di Kairo, Mesir, Lutfi Rauf. Pertemuan ini berfokus pada permasalahan terkait pengiriman pelajar dan mahasiswa Indonesia yang akan menimba ilmu di Mesir.

Mahyudin menekankan, pengiriman pelajar dan mahasiswa Indonesia ke Mesir memiliki proporsi yang cukup besar, mencapai sekitar 22 persen dari total mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri. “Jumlah yang signifikan ini menjadikan pengelolaan proses pengiriman pelajar perlu mendapatkan perhatian serius,” kata Mahyudin mengingatkan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Duta Besar RI Lutfi Rauf mengakui perlunya penertiban terkait berbagai masalah pengiriman pelajar Indonesia ke Mesir. Salah satu masalah penting yang disampaikan adalah praktik afiliator yang seringkali tidak sesuai dengan prosedur yang benar, seperti memberikan visa turis kepada para pelajar dengan batasan waktu yang terlalu singkat. Hal ini mengakibatkan para pelajar menjadi imigran ilegal yang harus bersembunyi dari aparat imigrasi Mesir saat visa mereka habis berlaku.



Pertemuan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dengan Duta Besar RI di Kairo, Mesir, awal Oktober lalu. (Foto: Kedubes RI Kairo)

Pertemuan yang dihadiri Wakil Dubes, M. Zaim A. Nasution; Koordinator Fungsi Politik, Dian Ratri Astuti; Koordinator Fungsi Ekonomi, Tennike; Atase Pendidikan, Bambang Suryadi; Koordinator fungsi protokol dan konsuler, John Admiral, anggota DPD RI Abdurrahman Bahmid, dan Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, ini mencerminkan keseriusan pihak terkait dalam mencari solusi untuk berbagai masalah dan menjamin bahwa pelajar Indonesia yang kuliah di Mesir dapat melakukannya dengan aman, legal, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Melalui kerja sama antara DPD RI dan KBRI di Kairo, diharapkan akan ada perbaikan signifikan dalam pengelolaan pengiriman pelajar ke Mesir, serta perlindungan dan pemantauan yang lebih baik terhadap para pelajar tersebut. (*)

“Aspek kesehatan juga perlu menjadi perhatian. Banyak pelajar yang dikirim ke Mesir tanpa melalui pemeriksaan kesehatan yang memadai di tanah air. Banyak pelajar menghadapi masalah kesehatan serius setelah tiba di Mesir, bahkan ada yang meninggal. Beberapa di antara mereka juga ditemukan mengidap penyakit menular seperti TBC yang dapat membahayakan kesehatan pelajar lainnya yang tinggal dalam satu asrama.”

Lutfi Rauf
Duta Besar RI untuk
Mesir



Anggota DPD RI Afnan Hadikusumo (dua dari kiri) saat menyerap aspirasi masyarakat di Manding, DIY, awal Oktober 2023. (Foto: Istimewa)

Anggota DPD RI Prihatin Maraknya Perundungan di Sekolah

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa perundungan masih banyak terjadi di lingkungan sekolah di Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkapkan adanya 16 kasus perundungan di lingkungan sekolah selama periode Januari hingga Agustus 2023.

Anggota DPD RI Afnan Hadikusumo saat menyerap aspirasi masyarakat di Manding, DIY, awal Oktober 2023, menyebutkan kasus perundungan ini terutama terjadi di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), mencapai 25 persen dari total kasus. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Mene-

ngah Kejuruan (SMK) mengalami kasus serupa dengan persentase 18,75 persen.

Meski jumlahnya lebih rendah, Madrasah Tsanawiyah dan pondok pesantren juga melaporkan kasus perundungan, masing-masing sebesar 6,25 persen. Afnan menyoroti bahwa situasi ini menjadi suatu keprihatinan bersama, mengingat pentingnya menghormati Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi Indonesia. Ia menekankan bahwa semua aspek dalam negara, termasuk moral, politik, hukum, dan hak asasi warga negara, harus selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

“Sebagai masyarakat yang hidup bersama, kita harus

dapat mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia kita sendiri, sambil menghormati dan menjaga hak asasi manusia orang lain. Pelanggaran hak asasi manusia, baik oleh individu maupun oleh pihak lain, harus dihindari,” ucapnya dalam pertemuan dengan masyarakat tersebut.

Afnan berharap bahwa pemerintah dan lembaga yang terlibat dalam perlindungan hak asasi manusia dapat menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Yang terpenting adalah memperlakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang secara nyata melanggar hak asasi manusia, baik pelanggaran berat maupun ringan. (*)

Budaya Politik Dinasti dan Feodalisme Harus Diubah

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jimly Asshiddiqie, menekankan pentingnya mengubah budaya politik dinasti dan feodalisme yang dapat menghambat perkembangan politik institusional. Modernisasi budaya politik dan institusionalisasi politik adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan praktik demokrasi di Indonesia.

Selain itu, senator asal DKI Jakarta ini juga menilai perlunya penguatan pengakuan terhadap hak-hak minoritas sebagai suatu langkah untuk menjaga keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh mayoritas. Ini tidak hanya berlaku untuk hak-hak etnis dan agama, tetapi juga terkait dengan keputusan politik dan ekonomi.

Jimly mencatat bahwa Indonesia menerapkan prinsip *rule of law* dalam praktik demokrasi, yang berarti negara diatur berdasarkan peraturan dan hukum, bukan oleh kehendak pihak tertentu. Namun, dalam kenyataannya, prinsip *majority rule* sering kali berlaku, di mana partai-partai dengan mayoritas kursi menentukan hasil akhir dalam pembentukan peraturan.

“Jika demokrasi hanya mengandalkan *majority rule*,



Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie. (Foto: tvonenews.com)

maka praktiknya akan terbatas pada prosedur dan formalitas belaka. Oleh karena itu, perlu memasukkan elemen *minority rights* dalam *majority rules* untuk menciptakan keseimbangan,” kata senator asal DKI Jakarta tersebut dalam forum diskusi Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) yang digelar Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Jakarta, awal Oktober 2023.

Jimly juga menyebut bahwa pelibatan perempuan dalam berbagai bidang, terutama dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, adalah contoh konkrit dari penerapan *minority rights* dalam *majority rules*. Untuk membuat demokrasi lebih sub-

stansial, penting untuk menerapkan *rule of law* secara fungsional.

Diskusi IYDF dengan tema “*Protecting Democracy in the 21st Century: The Role of the Youth*” merupakan bagian dari upaya untuk memahami peran pemuda dalam mempertahankan demokrasi. Forum ini juga diadakan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan *Konrad-Adenauer-Stiftung* (KAS) Indonesia. IYDF melibatkan 20 pemuda dari seluruh Indonesia untuk berdialog dengan lembaga dan organisasi masyarakat guna merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. (*)

Masalah Hukum Adat Jangan Diabaikan



Anggota DPD RI Sanusi Rahaningmas saat menyerap Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) di Kota Sorong. (Foto: Ist)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sanusi Rahaningmas, mengadakan kegiatan untuk menyerap Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) dengan tema “Jaminan atas Hak Hukum Adat” di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada pertengahan Oktober 2023. Peserta dalam acara ini terdiri dari aktivis Kota Sorong, pemuda Kota Sorong, dan tamu undangan lainnya.

Sanusi Rahaningmas menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat

terkait hak atas tanah adat di wilayah Papua. Dia menyadari bahwa wilayah Papua kaya dengan wilayah adat, dan sangat penting untuk membahas masalah jaminan hak hukum adat masyarakat.

“Terlalu sering keluhan masyarakat dalam hal ini tidak didengar, sehingga masyarakat hukum adat merasa diabaikan demi kepentingan pemerintah dan politik,” kata Sanusi sembari mengungkapkan keinginannya agar hak masyarakat hukum adat dapat diselesaikan dengan serius dan tidak diabaikan.

Sanusi juga menyadari per-

bedaan antara hukum adat yang bersifat tersirat dan hukum pemerintah yang bersifat tertulis. Oleh karena itu, dia berharap bahwa masalah yang muncul dalam hukum adat bisa diselesaikan secara bersama-sama, tanpa mengabaikan hukum adat.

Ini menjadi sangat penting terutama dalam konteks masyarakat hukum adat di lingkungan tertentu. Sanusi menekankan pentingnya menemukan solusi yang mengintegrasikan baik hukum adat maupun hukum pemerintah untuk kepentingan bersama. (*)

Senator Cholid Mahmud Tutup Usia



H. CHOLID MAHMUD, ST., M.T.
B - 56
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Innalillahir wa inna ilaihi rajiun. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali kehilangan salah seorang anggota terbaiknya. Pada akhir Oktober 2023, senator Cholid Mahmud yang lebih akrab dikenal sebagai Ustadz Cholid wafat di Rumah Sakit JIH Yogyakarta, sekitar pukul 03.21 WIB. Ustadz Cholid adalah seorang tokoh penting asal Yogyakarta yang aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi dakwah.

Sebelum dimakamkan, jenazah Ustadz Cholid disemayamkan di kediamannya di Jomblangan, Bantul, Yogyakarta. Cholid telah menjadi anggota DPD RI asal DIY sejak periode 2009-2014, kemudian terpilih kembali pada periode 2014-2019, dan periode 2019-2024. Namun, dengan kesedihan yang mendalam, Ustadz Cholid telah menyatakan sejak awal bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi dalam Pemilu 2024 karena alasan kesehatan yang memburuk.

Cholid Mahmud, lahir di Semarang pada tanggal 31 Januari 1966, merupakan putra dari KH. Zaenal Mahmud, pengasuh Pondok

Pesantren Sabilul Khairaat, Tenganan, Semarang. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA I Salatiga sebelum melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi. Setelah meraih gelar S1 di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM, ia kemudian melanjutkan ke tingkat S2 di kampus yang sama dengan spesialisasi dalam bidang Beton dan Teknologi Pasir. Keberhasilan dan pengabdian Cholid menjadi inspirasi bagi banyak orang dan meninggalkan kenangan yang indah dalam sejarah Provinsi DIY dan dunia politik Indonesia.

Dalam perjalanan hidupnya, Ustadz Cholid Mahmud telah memberikan kontribusi yang berarti dalam menginspirasi dan membimbing banyak individu melalui ajaran agama dan pengabdiannya di dunia politik. Warisan Cholid akan terus dikenang dan dihormati oleh masyarakat DIY dan Indonesia. Diantar handai taulan, Cholid dimakamkan di Kompleks Ponpes Nurul Islam Tenganan, Semarang. Ini sekaligus mengingatkan kita akan warisan dan pengabdiannya dalam dunia dakwah. (*)

Indonesia Harus Jadi Kunci Industri Nikel Dunia



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat menyampaikan sambutan pada peringatan hari jadi Kabupaten Morowali Utara beberapa waktu lalu. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

Kebijakan hulu Pemerintah Indonesia di industri nikel berbasis komoditas harus dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi bangsa di tengah fluktuasi pasar global. Pendekatan ini sangat penting untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci di dunia. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam pidatonya saat malam apresiasi Peringatan Hari Jadi ke-10 Kabupaten Morowali Utara di Pelataran Kantor Bupati setempat, akhir Oktober lalu.

Dalam acara tersebut, Nono menyoroti peran Indonesia sebagai penjaga kekayaan alam yang melimpah, dengan cadangan nikel terbesar di dunia dan memimpin dalam vitalitas ekonomi. “Pengolahan hilir di industri

pertambangan nikel bukan hanya masalah ekonomi, ini adalah agenda nasional yang menyangkut mata pencaharian banyak orang dan sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi dan pembangunan bangsa,” katanya.

Dengan merujuk pada data tahun 2022 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nono menunjukkan cadangan nikel Indonesia sebesar 72 juta ton, yang mencakup 52% dari cadangan global, dan tingkat produksi tertinggi di dunia sebesar 1 juta ton. Pengolahan hilir nikel telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekspor non-migas, mencapai 2,17% hanya pada tahun 2022.

Nono juga membahas meningkatnya permintaan akan kendaraan listrik ramah lingkungan (EV), yang saat ini

menyumbang 2% dari penjualan mobil global namun diproyeksikan mendominasi 58% pada tahun 2040. Perubahan ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bahan baku bagi industri baterai litium-ion.

“Angka-angka ini bukan hanya statistik, tetapi melambangkan pemberdayaan dan kepercayaan yang harus kita kelola dengan bijak,” kata Nono sembari menyatakan keyakinannya bahwa melalui kerjasama yang efektif dan dedikasi yang kuat di antara para pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan masyarakatnya dapat merangkul tantangan ini dan mencapai kesuksesan bersama sebagai bangsa di masa mendatang. (*)

Pimpinan DPD RI Prihatin, Anggota BPK Tersangka Korupsi



Ilustrasi BTS (Foto: tvOnenews.com)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyampaikan keprihatinannya terkait kasus suap yang diduga melibatkan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi, dalam konteks pengadaan menara BTS Kementerian Informasi dan Komunikasi. Dalam pernyataannya awal Oktober lalu, Sultan menggarisbawahi pentingnya peran BPK dalam pemberantasan korupsi dan menyuarakan keinginan agar Kejaksaan Agung RI dapat menyelidiki kasus ini dengan transparansi yang maksimal.

Sultan menegaskan, peristiwa ini telah menggores citra lembaga BPK RI yang selama ini dikenal sebagai lembaga audit keuangan yang profesional dan akuntabel. “BPK RI yang telah mengukir prestasi gemilang

di tingkat internasional, kini menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan reputasinya,” kata Sultan.

Untuk menjaga integritas dan kredibilitas BPK, Sultan mendorong agar lembaga ini segera memperbarui sistem pengawasan internalnya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan perlindungan terhadap anggota BPK dari potensi intervensi pihak eksternal yang dapat mempengaruhi objek pemeriksaan. Sultan menekankan bahwa usulan ini bukan untuk meragukan integritas anggota dan auditor BPK, tetapi sebagai upaya perbaikan internal lembaga tersebut.

Sultan juga mengungkapkan bahwa DPD RI telah lama melakukan seleksi terhadap calon anggota BPK sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun,

seringkali hasil seleksi DPD RI tidak mendapatkan perhatian serius dari DPR. Oleh karena itu, Sultan menyampaikan usulan untuk memperkuat keterlibatan DPD RI dalam proses seleksi calon anggota BPK secara konstitusional, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan anggota BPK.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan menara BTS 4G Kementerian Kominfo. Achsanul diduga menerima suap sejumlah Rp40 miliar dari IH melalui SR dan WP di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Juli 2022 dan dihadapkan pada sejumlah pasal, termasuk gratifikasi, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). (*)

DPD RI Serukan Serangan Israel Harus Dihentikan

DPD RI dengan tegas mengecam agresi militer Israel terhadap Palestina yang telah berakibat fatal dengan ribuan nyawa melayang. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip kemerdekaan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi juga menimbulkan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan.



Anggota DPD RI Hasan Basri.
(Foto: Doc.Ist)

Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengecam keras serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Gaza, termasuk sebuah rumah sakit yang didukung oleh bantuan kemanusiaan Indonesia melalui Mer-C. Dalam siaran persnya pertengahan Oktober 2023, Basri menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan meresahkan komunitas internasional. "Israel telah menunjukkan sikap yang mengabaikan rasa hormat pada bantuan kemanusiaan," ujar Hasan Basri

dengan nada penyesalan.

Lebih lanjut anggota DPD RI asal Kaltara ini mengutuk tindakan yang ia anggap merampas hak-hak dasar negara dan individu untuk hidup merdeka dan berdaulat. "Serangan yang menyasar rumah sakit adalah tindakan yang sangat tidak pantas dan harus segera dihentikan," tambahnya.



Anggota DPD RI Ahmad Gazali
(Foto: Biro PHM DPD RI)

Anggota DPD RI asal Riau, Muhammad Gazali, dalam nada yang berat, menyerukan semua anggota untuk bersuara keras menentang kekejaman yang berlangsung dan mendesak Indonesia untuk mengambil langkah konkret demi mengakhiri penindasan tersebut.

Dalam nada yang penuh semangat, Gazali menyampaikan apresiasi kepada kepemimpinan DPD RI yang telah mengangkat isu penindasan Palestina sebagai sorotan nasional, bahkan internasional. DPD RI, katanya, berdiri kokoh bersama rakyat Palestina, mengutuk setiap tindak kekerasan yang

dilakukan oleh Israel, sebuah simbol solidaritas yang dikumandangkan dari Senayan.



Anggota DPD RI Jialyka Maharani.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani mengekspresikan dukacitanya atas situasi di Palestina, mengutuk agresi tentara Israel sebagai bentuk penjajahan dan genosida. Dia menekankan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian yang dijunjung tinggi oleh Indonesia dan mendesak tindakan kemanusiaan global.

"Kita adalah bangsa yang lahir dari semangat anti-penjajahan dan perdamaian. Apa yang terjadi di Palestina adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut," kata Jialyka. DPD RI mendorong pemerintah menggunakan diplomasi untuk mengadvokasi gencatan senjata di Israel dan menyediakan bantuan yang diperlukan. Jialyka juga menuntut langkah-langkah strategis untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. (*)



Ketua Komite IV DPD RI Amang Syafruddin, menyerahkan laporan kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Sidang Paripurna ke – 3 Masa Sidang I Tahun 2023-2024 (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

KEMBALIKAN MARWAH OTONOMI DAERAH!



Ketua Komite IV Amang Syafruddin, Lc., saat menyampaikan laporan dalam Sidang Paripurna ke – 3 Masa Sidang I Tahun 2023-2024. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pengembalian otonomi daerah untuk optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD). Permintaan itu disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafruddin, dalam Sidang Paripurna ke 3 Masa Sidang I Tahun 2023-2024, akhir September lalu, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Komite IV mendorong Pemerintah untuk mengembalikan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 dan memindahkan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk memperkuat otonomi daerah setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan alokasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang sesuai dengan porsi kewenangan daerah.

Komite IV DPD RI juga mendesak Pemerintah untuk menjadikan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) lebih pro-daerah penghasil, dengan fokus pada penggunaan DBH bidang kehutanan untuk masyarakat sekitar hutan dan pemulihan kerusakan hutan. “Kita juga menuntut regulasi pembagian DBH sumber daya kelautan yang lebih adil dan segera melunasi DBH terhutang

kepada pemerintah daerah, termasuk anggaran untuk menangani dampak negatif pengelolaan Sumber Daya Alam,” kata Senator dari Jawa Barat itu.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), Komite IV DPD RI meminta Pemerintah untuk menyusun petunjuk teknis dan formula pembagian DAK yang baku dan mudah dilaksanakan oleh daerah sebelum tahun anggaran berjalan. Mereka juga menekankan perlunya penyesuaian alokasi DAK sesuai dengan kebutuhan daerah, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Selanjutnya, terkait dana desa, Komite IV DPD RI mengusulkan peningkatan alokasi anggaran dana desa dan penghapusan mandatory penggunaan dana desa agar desa memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih besar sesuai dengan semangat otonomi desa. DPD RI juga mendorong desentralisasi fiskal yang mencakup peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui perencanaan yang berkualitas.

Terakhir, komite ini juga mendesak Pemerintah untuk memungkinkan penggunaan sisa lebih pengeluaran (SILPA) Daerah dari alokasi DAK yang tidak terealisasi pada tahun sebelumnya untuk menutup defisit pembiayaan APBD tahun berjalan. (*)



Ketua PPUU DPD RI Dedi Iskandar Batubara menyerahkan laporan Komitennya kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Sidang Paripurna ke-4 Masa Sidang I tahun sidang 2023-2024, akhri September 2023. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

DPD RI Tetapkan Susunan Keanggotaan Alkel



Pimpinan DPD RI saat memimpin Sidang Paripurna ke-4 Masa Sidang I tahun sidang 2023-2024 di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, akhir September 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke-4 Masa Sidang I tahun sidang 2023-2024 dengan agenda yang mencakup penetapan perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan, laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengambilan keputusan DPD RI, dan pidato penutupan. Sidang yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, akhir September 2023 tersebut dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Mahyudin,

Pada awal sidang, Ketua PPUU DPD RI, Dedi Iskandar Batubara, menyampaikan perkembangan terkait pemantauan dan peninjauan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pembahasan RUU Prolegnas DPD RI, perencanaan legislasi dan RUU inisiatif DPD Tahun 2024. Dia berharap setidaknya dua RUU inisiatif DPD RI dapat disahkan menjadi undang-undang pada semester I tahun 2024.

Selanjutnya, Komite I DPD RI melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pandangan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komite I menegaskan komitmennya untuk memajukan kesejahteraan rakyat di daerah.

Komite III DPD RI melaporkan hasil penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap rancangan undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan mengapresiasi usulan DPR RI terkait RUU ini dengan beberapa catatan.

Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafrudin, menyampaikan hasil Pengawasan DPD RI atas UU No 28 Tahun 2023 tentang APBN, dengan fokus pada kebijakan transfer ke daerah, sambil menekankan pentingnya mengembalikan marwah otonomi daerah untuk optimalisasi transfer ke daerah.

Terakhir, Komite II DPD RI melaporkan perkembangan penyusunan RUU usul inisiatif Komite II dan rapat tripartit dengan DPR dan pemerintah terkait RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) serta RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Komite II intensif dalam rapat tripartit ini.

Sidang paripurna tersebut ditutup dengan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah untuk meredakan konflik di Pulau Rempang, serta permintaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) secara selektif, transparan, dan akuntabel. DPD RI juga menyoroti konflik di Pulau Rempang dan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. (*)



Soal Listrik, Komite II Adakan Raker di Sorong

Rombongan Komite II DPD RI saat mengunjungi salah satu distrik di Provinsi Papua Barat Daya. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite II DPD RI mengadakan rapat kerja untuk menindaklanjuti permohonan bantuan jaringan listrik di Distrik Klaso Kabupaten Sorong dan Distrik Selemkai Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya. Pertemuan yang berlangsung di Kota Sorong ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Sorong Selatan, Pj. Bupati Sorong, Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, pertengahan Oktober lalu.

Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad, mengungkapkan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah provinsi, termasuk masalah transportasi, air bersih, listrik, jalan, dan sanitasi. Dia juga menyampaikan fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan PLTS di wilayah tersebut.

Senator DPD RI asal Papua Barat, Mamberob Yosephus Rumakiek, menekankan bahwa masalah listrik adalah salah satu aspirasi masyarakat selama masa reses. Dia mengungkapkan bahwa masih banyak wilayah di Provinsi Papua Barat Daya yang

belum memiliki akses listrik.

Rombongan Komite II DPD RI, yang dipimpin oleh senator asal Papua, Yorrys Raweyai, memilih Provinsi Papua Barat Daya sebagai tujuan untuk mengadvokasi permasalahan listrik. Mereka menganggap bahwa masalah listrik bukan hal baru, melainkan masalah klasik yang telah lama ada. Mereka berharap pertemuan ini akan memberikan solusi yang diawasi bersama.

General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono, memberikan informasi terkait elektrifikasi di wilayah tersebut. Meskipun rasio elektrifikasi di wilayah tersebut sudah tinggi secara keseluruhan, rasio elektrifikasi khusus untuk PLN masih perlu ditingkatkan. Beberapa desa di Distrik Klaso dan Distrik Selemkai, kata Budiono, diharapkan akan mendapatkan pelayanan listrik sesuai dengan *roadmap* yang telah ditetapkan pada 2026 dan 2028.

Setelah diskusi, rombongan Komite II DPD RI melakukan tinjauan lapangan ke Distrik Klaso Kabupaten Sorong dan Distrik Selemkai Kabupaten Tambrauw untuk melihat langsung kondisi di lapangan. (*)



BULD DPD RI Terima Audiensi DPRD Tanah Datar

Tim BULD DPD RI saat mengadakan pertemuan dengan Pansus DPRD Tanah Datar di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Jakarta. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menerima audiensi dari Pansus DPRD Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pertengahan Oktober 2023, di Ruang Padjajaran DPD RI. Audiensi tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan dari BULD DPD RI dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Tanah Datar yang sedang disusun oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Tanah Datar, Eri Hendri, mengungkapkan tujuan audiensi mereka, yaitu untuk memastikan bahwa draf Ranperda yang mereka sampaikan telah mempertimbangkan segala aspek yang diperlukan. Mereka ingin memastikan agar peraturan tersebut tidak menimbulkan masalah di masa depan, serta untuk mencegah celah hukum yang mungkin timbul.

Menanggapi Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Tanah Datar, Tim Ahli BULD DPD RI, Wahyu Nugroho, menyoroti pentingnya penyelarasan

norma dengan peraturan hirarkis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam konteks penyertaan modal daerah.

Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Hanugra Ryantoni, mengemukakan enam prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan Ranperda ini. Dia menyoroti aspek investasi langsung dari penyertaan modal pemerintah daerah, penggunaan dana dari surplus APBD, penetapan penyertaan modal melalui perda, serta jenis penyertaan modal yang bisa berupa uang atau barang milik daerah. Selain itu, ia menekankan perlunya analisis sebelum penyerahan modal untuk menambah modal BUMD serta pentingnya memperhatikan aspek keamanan agar terhindar dari risiko anggaran.

Dalam kesempatan yang sama, Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Wachid Nugroho, menyoroti perlunya mendiskusikan lebih lanjut prinsip-prinsip tata kelola agar Ranperda tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dia menekankan pentingnya penjelasan tujuan dari penyertaan modal dalam penjelasan umum Ranperda tersebut. (*)



Sekretariat Jenderal DPD RI Raih Kembali JDIHN Award Tahun 2023

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali meraih penghargaan prestisius untuk kategori lembaga negara terbaik se-Indonesia pada acara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2023, yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan ini menjadi pencapaian kelima bagi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam kompetisi ini.

JDIHN Award 2023 mengambil tema penting, yaitu ‘Membangun Hukum Nasional Sebagai Perikat dan Pemersatu Bangsa Melalui Transformasi Digital’. Dalam acara penghargaan ini, Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI, Oni Choiruddin, menerima penghargaan tersebut. Dia didampingi oleh Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI, Andi Erham. Acara berlangsung di Jakarta pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menyampaikan bahwa JDIHN Award adalah bukti konkret dari perhatian pemerintah terhadap anggota JDIHN. Pengelolaan JDIHN didasarkan pada Peraturan Presiden No. 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dengan jumlah anggota JDIHN yang mencapai 1.662 instansi, tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang efektif antara pusat dan anggota JDIHN, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengelola sistem basis data yang terintegrasi.

Yasonna menegaskan, “Saya mengapresiasi kolaborasi yang gigih dari seluruh anggota JDIHN dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan JDIHN. Hal ini terutama berdampak pada penciptaan akses yang lebih terbuka terhadap dokumen dan informasi hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.” (*)



Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Oni Choirudin (kanan) usai menerima penghargaan JDIHN dari Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Suasana acara penganugerahan JDIHN Award 2023 di Jakarta pertengahan Oktober 2023. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Menteri Hukum dan HAM Yosanna H Laoly (ketiga dari kiri) sedang berbincang dengan sejumlah tamu, termasuk Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin (kanan) pada acara penganugerahan JDIHN Award 2023 di Jakarta. (Foto: Biro PHM DPD RI)



KRISIS BERAS DI NEGERI AGRARIS

Oleh:

Rindang Mustikawati
(Analisis Legislatif Muda)



Perubahan iklim menjadi salah satu ancaman serius bagi pasokan pangan, terutama di Indonesia. Saat ini Indonesia sedang dilanda pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah atau disebut El Nino. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik sehingga mengurangi curah hujan di Indonesia. Dengan demikian, El Nino juga bisa mengakibatkan kondisi kekeringan secara umum di Indonesia. Menurut BMKG, 63% wilayah RI saat ini sudah memasuki musim kemarau. Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, setidaknya 27.000 ha lahan pertanian mengalami kekeringan, salah satunya musim kemarau.

Pengaruh El Nino tersebut diperkirakan dapat menyebabkan Indonesia kehilangan produksi beras hingga 1,2 juta ton. Pasokan beras di Indonesia terganggu seret, setidaknya demikian yang terlihat dari pengadaan dalam negeri cadangan beras pemerintah (CBP) oleh Perum Bulog. Di mana per Oktober 2023 tercatat sebanyak 78.712 ton di semester 2 tahun 2023, jauh

lebih rendah dibandingkan periode sama tahun 2022 yang mencapai 443.842 ton. Khusus bulan Agustus 2023, pengadaan dalam negeri hanya 8.837 ton, jauh dibandingkan Agustus 2022 yang mencapai 33.018 ton. Dengan pasokan yang menurun menyebabkan harga beras di pasar mulai melambung. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras di tingkat konsumen meningkat dalam satu tahun terakhir sebesar 18,44%. Kenaikan harga beras ini akibat penurunan luas panen yang kemudian didorong dampak El Nino. Secara umum, inflasi harga beras September 2023 dibandingkan bulan sebelumnya meningkat sebesar 5,61%. Angka inflasi beras bulanan ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, atau sejak Februari 2018.

Berdasarkan survei lembaga IPB, biaya produksi petani yang meningkat tajam dalam empat tahun terakhir ikut mempengaruhi kenaikan harga beras. Salah satu penyebab kenaikan ini diantaranya adalah pupuk. Pasokan bahan baku pupuk terganggu karena Rusia sebagai salah satu produsen bahan baku pupuk terbesar di dunia masih perang. Kondisi tersebut menyebabkan



kan harga pupuk impor menjadi mahal. Pemerintah pun menyesuaikan hal itu dengan memangkas jumlah golongan petani yang mendapat subsidi. Dari 69 komoditas yang boleh menggunakan pupuk subsidi kini hanya ada 9 komoditas saja yang boleh gunakan pupuk subsidi. Selain itu subsidi pupuk dalam negeri belum mencukupi seluruh petani di Indonesia. Pupuk yang dibutuhkan petani se-Indonesia yang ada dalam data Kementerian Pertanian sebesar 24 juta ton. Tapi, kemampuan keuangan negara yang ada selama ini hanya

dapat menyediakan 8-9 juta ton untuk penyediaan pupuk subsidi. Pengawasan oleh pemerintah tentang distribusi pupuk subsidi ini juga menjadi masalah dikarenakan cakupannya yang sangat luas. Masalah data lagi-lagi menjadi penghambat penyaluran bantuan untuk para petani. Kurang akuratnya data petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi yang dimiliki pemerintah menyebabkan subsidi pupuk tidak tepat sasaran.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, sistem pangan nasional menempatkan kedaulatan dan

kemandirian pangan sebagai spirit/pondasi dalam melaksanakan pembangunan pangan nasional. Kedaulatan negara dan bangsa dalam menentukan kebijakan dan sistem pangan dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pangan bagi rakyat dengan mengutamakan potensi sumber daya lokal. Pemerintah perlu mendukung pembangunan pangan nasional, antara lain dengan melakukan pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan infrastruktur sehingga kedaulatan pangan tercapai. (*)



Catatan Kritis Atas Proposal Kenegaraan DPD RI: Peluang dan Tantangan Anggota DPR dari Jalur Perseorangan

Oleh:

Oleh: Friederich Batari

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengusulkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat berasal dari peserta Pemilu unsur perseorangan atau nonpartisan. Usulan tersebut tidak hanya menarik, tetapi perlu diangkat menjadi salah satu tema kampanye pada Pemilu dan Pilpres 2024.

Gagasan anggota DPR dari jalur perseorangan ini secara resmi disampaikan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2023. Saat itu, LaNyalla menyampaikan pidatonya yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, pimpinan dan anggota MPR/DPR RI dan DPD RI, para tokoh termasuk duta besar negara sahabat.

Terbaru, Ketua DPD RI kembali menyampaikan gagasan anggota DPR dari jalur perseorangan pada acara Press Gathering Forum Komunikasi dan Diseminasi Program Ker-

ja dengan Media DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bertema “Membedah 5 Proposal Kenegaraan” di Cirebon, 21-23 September 2023.

DPD RI berpandangan bahwa anggota DPR tidak hanya diisi dari peserta Pemilu unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja. Namun, secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi. Dengan demikian, anggota DPD RI yang juga dipilih melalui Pemilu legislatif, berada di dalam satu kamar di DPR RI sebagai bagian dari pembentuk Undang-Undang.

Berkaitan dengan itu, DPD RI mengusulkan selain posisi

MPR sebagai lembaga tertinggi negara, posisi DPR juga penting dilakukan penyempurnaan dengan kehadiran nonpartisan atau unsur perseorangan yang dapat memberikan warna baru bagi mekanisme pembahasan sebuah Undang-Undang.

Hal ini dikarenakan bentuk perwakilan nonpartisan tersebut akan terlepas dari kepentingan-kepentingan partai politik yang saat ini merupakan ‘pemain tunggal’ di lembaga legislatif yang juga memiliki fungsi pengawasan dan anggaran.

“Kontrol yang nantinya diperankan oleh nonpartisan di sebuah lembaga legislatif tentunya akan lebih mengarahkan pada terwujudnya sebuah demokrasi yang lebih substantif, bermakna, dan *sufficient*,” ujar Ketua DPD RI LaNyalla. Mengenai usulan DPD RI soal anggota DPR RI dari unsur perse-





orangan ini perlu dikaji lebih mendalam bagaimana peluang dan tantangan untuk mewujudkannya.

Peluang

Menurut saya, usulan DPD RI ini dapat diwujudkan apabila semua elite politik memiliki komitmen dan sepemahaman yang sama untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan kita. Saat ini, dukungan terhadap usulan anggota DPR RI dari unsur perseorangan tidak hanya datang dari anggota DPD RI. Namun, sejumlah pakar juga memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut karena dianggap perlu untuk memaksimalkan dalam memperjuangkan aspirasi, melahirkan pemikiran bangsa yang cerdas, penuh inovasi, serta banyak melahirkan terobosan pemikiran untuk membangun bangsa.

Sejalan dengan usulan DPD RI, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Airlangga Radian Salman mengatakan, pemilu legislatif seharusnya juga memillih anggota DPR dari unsur perseorangan. Lebih lanjut, Radian berpandangan anggota DPR dari jalur perseorangan akan lebih leluasa bergerak karena tidak dipagari ideologi partai politik. Hal itu diungkapkan Radian saat menjadi salah satu pembicara di acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Perlunya Peserta Pemilu Perseorangan di DPR RI yang diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur (mediaindonesia.com, Kamis, 15/6/2023).

Sementara itu, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif (Indonesian Center for Legislative Drafting) juga menyinggung soal sistem trikameral di Indonesia. Fitriani menyetir pandangan Prof. Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar yang menyebutkan bahwa sistem unikameral merupakan model yang meleakatkan adanya lembaga tunggal sebagai pemegang kuasa di lembaga parlemen. Dalam sistem ini diisi oleh anggota yang berasal dari beragam representasi, yakni representasi partai politik, representasi daerah, maupun representasi suku dan jenis kelamin (hukumonline.com, Jumat, 28/7/2023). Saldi dan Zainal menyebutkan contoh negara yang menganut sistem unikameral, yaitu Korea Selatan dan Taiwan. Oleh karena itu, dalam pengisian anggota legislatif pada lembaga parlemen di negara tersebut diperbolehkan untuk mendafatar dari jalur independen.

Artinya tidak hanya yang berasal dari representasi partai politik saja, melainkan dapat juga berasal dari representasi lainnya yang tidak berkaitan dengan partai politik (independen). Untuk mewujudkan anggota DPR dari unsur perseorangan maka perlu melakukan amendemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945. Amendemen konstitusi sebenarnya sebuah keniscayaan apabila para elite politik memiliki kejernihan hati dan memiliki jiwa kenegarawanan untuk menata sistem kenegaraan Indonesia.

Tantangan

Untuk merealisasikan usulan DPD RI agar anggota DPR berasal dari unsur perseorangan, sebenarnya bukan perkara mudah. Sebab, anggota DPR saat ini yang semuanya berasal dari partai politik tentu saja telah merasa nyaman. Sebab selama ini menjadi ‘pemain tunggal’ bersama Presiden dalam hal pembuatan Undang-Undang. Oleh karena itu, untuk merealisasikan proposal kenegaraan dari DPD RI ini perlu perjuangan panjang, proses lobi-lobi kepada para (ketua umum) partai politik agar mengakomodasi usulan tersebut.

Saya optimistis proposal kenegaraan yang diusulkan DPD RI dapat terealisasi melalui sosialisasi secara masif sehingga pada akhirnya menjadi gerakan bersama seluruh rakyat di seluruh pelosok Nusantara. Dengan demikian, jika sudah menjadi gerakan bersama dan menjadi kebutuhan rakyat Indonesia maka para elite politik terutama partai politik, mau tidak mau harus menuruti kehendak rakyat.

Saya menaruh harapan bahwa masih banyak politikus yang baik dan bijaksana sehingga usulan DPD RI ini suatu saat akan terealisasi demi penyempurnaan sistem kenegaraan yang responsif terhadap perkembangan zaman utamanya dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab.

(*Penulis adalah jurnalis/Alumnus Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta)



Empat Destinasi Menarik di Kalbar

1. Taman Nasional Gunung Palung:

Terletak di Kabupaten Ketapang, taman nasional ini adalah rumah bagi salah satu hutan hujan tropis yang paling beragam di dunia. Anda dapat menjelajahi jaringan jalur *hiking* yang memungkinkan Anda untuk melihat keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hutan ini juga merupakan habitat bagi orangutan liar. Pendakian ke puncak Gunung Palung, yang merupakan puncak tertinggi di taman nasional ini, adalah pengalaman mendebarkan. Dari sini, Anda dapat menikmati pemandangan spektakuler yang mencakup hutan lebat dan pesisir pantai.



Orangutan Gunung Palung
(Foto: Yayasan Palung)

2. Pantai Teluk Kelambu:

Terletak di Kabupaten Ketapang, pantai ini menawarkan suasana yang tenang dengan pasir putih dan air laut yang bening. Aktivitas *snorkeling* dan menyelam sangat populer di sini karena terumbu karang yang indah dan kehidupan laut yang beragam. Anda dapat mengeksplorasi dunia bawah laut yang menakjubkan. Pantai ini juga merupakan tempat yang bagus untuk bersantai, berjemur, atau berjalan-jalan di sepanjang pantai yang tenang.



Pantai Kelambu, Kalbar (Foto: Dok. Ist)

4. Desa Adat Dayak:

Kalimantan Barat adalah rumah bagi berbagai suku Dayak yang memiliki tradisi budaya yang kaya dan unik. Mengunjungi desa-desa adat Dayak memungkinkan Anda untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kehidupan, budaya, seni, dan tradisi mereka. Anda dapat melihat rumah tradisional Dayak, menyaksikan upacara adat, dan berinteraksi dengan penduduk setempat untuk memahami nilai-nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh suku Dayak. (*)



Gawai Dayak. (Foto: GNFI)

3. Kebun Binatang Singkawang:

Sinka Zoo adalah satu-satunya kebun binatang yang ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Kebun binatang ini terletak di kawasan Singka Island dan memiliki topografi yang berbukit-bukit. Terdapat aneka jenis hewan di kebun binatang ini, seperti rusa dan kerbau albino. Selain itu, ada juga orangutan, gajah, beruang madu, ular, sampai burung merak. Keunikan kebun binatang ini salah satunya yaitu dekat dengan Pantai Bajau, Pantai Panjang dan Pantai Siping. Tidak hanya pantai dari area kebun binatang terdapat jembatan yang langsung terhubung ke pulau terkecil di dunia, yaitu Pulau Siping. Di pulau ini terdapat hutan yang rimbun dan kelenteng mini. (tp)



Sinka Zoo (Foto: Trapelspromo)

Empat Kuliner Enak dari Kalsel

1 Soto Banjar:



Soto Banjar, Kalsel (Foto:WP)

Soto Banjar adalah hidangan sup tradisional yang khas dari Kalimantan Selatan, khususnya suku Banjar. Kuahnya terbuat dari kaldu ayam yang diberi rempah-rempah seperti serai, daun jeruk, dan bawang putih. Rasa kuahnya gurih, harum, dan pedas. Soto Banjar biasanya disajikan dengan potongan daging ayam, nasi, telur rebus, tauge, dan bawang goreng. Anda juga bisa menambahkan sambal atau jeruk nipis sesuai selera.

2 Martabak Manis Banjar:

Martabak manis Banjar adalah kue manis yang terbuat dari adonan tebal yang digoreng. Adonannya mengandung campuran gula, kacang, dan cokelat, memberikan cita rasa manis dan gurih. Martabak ini sering diiris menjadi potongan kecil dan disajikan sebagai camilan. Rasanya yang kaya dan tekstur yang renyah membuatnya menjadi makanan penutup yang sangat populer.



Martabak manis Kalsel (Foto: WP)

3 Laksa Banjar:



(Foto:Ist)

Laksa Banjar adalah hidangan mie berkuah pedas yang khas dari Kalimantan Selatan. Kuahnya kental dan beraroma, karena bumbu khas Banjar seperti kunyit, lengkuas, dan bawang merah. Biasanya, laksa Banjar disajikan dengan mie kuning, potongan daging ayam, telur rebus, dan perkedel kentang. Rasa pedas dan beraroma kuahnya membuat hidangan ini istimewa.

4 Amplang:



Amplang, Kalsel. (Foto: Ant)

Amplang adalah camilan populer di Kalimantan Selatan. Camilan ini terbuat dari ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung, rempah-rempah, dan santan kelapa. Adonan ikan ini kemudian digoreng hingga garing dan menghasilkan camilan dengan cita rasa asin, pedas, dan gurih. Amplang sering dijual dalam bentuk kerupuk dan menjadi camilan yang nikmat dan renyah.



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

HARI PAHLAWAN

**MERDEKA
ATAU
MATI!**

10 NOVEMBER

